



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ARSITEKTUR PERUMAHAN
(Studi kasus perlindungan arsitektur perumahan di kota Semarang)**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**PROGRAM STUDI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Oleh :

**Fanny Puspita, SH
B4A 007 086**

**PEMBIMBING :
Dr. BUDI SANTOSO, SH.,MS.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ARSITEKTUR PERUMAHAN
(Studi kasus perlindungan arsitektur perumahan di kota Semarang)**

Disusun oleh :

**Fanny Puspita, SH.
B4A 007 086**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 11 Juni 2009**

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Budi Santoso, SH.MS.
NIP. 131 631 876

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH,MH.
NIP. 130 531 702

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, FANNY PUSPITA, SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun dari Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 11 Juni 2009
Penulis

Fanny Puspita, SH.
NIM. B4A 007 086

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ARSITEKTUR PERUMAHAN (Studi kasus perlindungan arsitektur perumahan di kota Semarang).

Penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sumbangan sehingga mampu memberikan informasi dan gambaran (diskripsi) yang jelas dan tepat sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah, organisasi profesi, dan anggota masyarakat dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam rangka perlindungan hak cipta arsitektur perumahan.

Penulis sangat menyadari bahwa karya ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pemikiran maupun tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Budi Santoso,SH.,MS. atas kesediaanya memberikan bimbingan dan petunjuk, serta saran sejak dari awal penyusunan proposal hingga selesainya penulisan ini.

Selain itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis tujukan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan (Studi kasus perlindungan arsitektur perumahan di kota

Semarang) berdasarkan DIPA Sekretaris Jendral DEPDINKAS Tahun Anggaran 2007 sampai dengan tahun 2009.

2. Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo, MS, Med, Sp.And., Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Ani Purwanti, SH., M.hum., Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Amalia Diamantina, SH., M.hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Para Guru Besar dan staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro yang secara professional dan semangat pengabdian telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Ir. Bambang Setioko, M.Eng., arsitek, dan Anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K), yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data guna penulisan tesis ini.
8. Ir. Agung Dwiyanto, MSA, arsitek dan Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan kepada penulis yang telah bersedia memberikan keterangan dan informasi yang sangat berguna bagi penulisan tesis ini.
9. Ir. Budi H., arsitek yang telah bersedia memberikan keterangan dan informasi yang sangat berguna bagi penulisan tesis ini.
10. Bapak Budhiarso.W.,SH.,MH, Penyidik HKI pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kantor Wilayah Jawa Tengah.
11. Bapak Ir.Gunawan Wicaksono, Kasubdin Perencanaan dan Perizinan Dinas Tata Kota.

12. Seluruh Karyawan dan Staff Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Teman-teman dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan dorongan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua, yang terkasih Ayahanda Wirto Kamiran dan Ibunda Endang Suprih Murdiyarti atas segala bimbingan dan tuntunannya, doanya, dan pengorbanan yang tak terhingga, semoga Allah S.W.T. memberikan kesempatan dan kemampuan bagi penulis untuk dapat mengabdikan dan berbakti kepada keduanya, serta kakak-kakak, merupakan satu karunia yang besar dan satu kebanggaan dapat menjadi bagian dari hidup kalian, terima kasih atas segala bantuan, doa dan dukungannya, semoga Allah S.W.T. memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah dikaruniakannya kepada penulis. Terakhir terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Ramadhani Guruh atas segala bantuan dan dukungannya, semoga Allah S.W.T. juga memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk dapat membalas segala kebbaikannya.

Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sehubungan dengan upaya perlindungan hak cipta arsitektur perumahan.

Semarang, Juni 2009

Penulis,

Fanny Puspita, SH.

ABSTRAK

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi pada suatu kenyataan bahwa dalam perkembangan pembangunan yang semakin maju sangat dibutuhkan perlindungan hukum atas karya arsitektur untuk menghindari adanya pelanggaran hukum terhadap karya arsitektur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak cipta arsitektur di Indonesia. Apakah ketentuan Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengakomodir perlindungan hukum atas karya arsitektur pada umumnya?. Selain itu juga untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan timbulnya pelanggaran, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Penelitian ini bersifat diskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data sekunder dari penelitian lapangan, serta didukung data kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disusun secara sistimatis yuridis.

Hasil penelitian penulis adalah persamaan desain arsitektur perumahan tidak dapat ditemukan barometer penegas antara satu dengan yang lain. Adapun faktor penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur perumahan adalah kurang efektifnya peraturan perundang-undangan, disebabkan kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparaturnya terkait, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan sanksi yang relatif masih ringan, kurangnya pemahaman dari lingkungan arsitek tentang perlindungan hak cipta karya arsitektur perumahan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran terhadap karya arsitektur perumahan adalah melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara lembaga dan aparaturnya terkait, memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas, dan memberikan sosialisasi di kalangan arsitek. Kesimpulan tesis ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap karya arsitektur perumahan di Kota Semarang belum terlaksana sebagaimana seharusnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Karya Arsitektur Perumahan

ABSTRACT

The background of this thesis is the reality on growth development of houses architectural work requires law protection in order to avoid law infringement to architectural work.

This research, aims to identify how architectural copyright in Indonesia work. Did act Stipulation, such as Act No. 19 Year 2002 due to copyright have facilitated law protection on architectural work generally? Besides, there are needs to identify, what factors that causes kinds of infringement. This research is descriptive-analysis, using juridical-empirical approach. Write also use data collection method based on primary and secondary data from field observation, provided by literature, then analyzed using qualitative method and arranged by juridical systematically.

The result is similarity of houses architecture design that has not found clear barometer for each other. As for, caused factor of emerges of infringement to houses architecture copyright is ineffective acts rules, caused by less of cooperation and coordination between related stakeholders, less of law awareness and less of act socialization, more heavy and distinct of sanction inform to architectural people. The conclusion is, law protection against houses architectural work in Semarang City has not been performed yet, such as Stipulation of Copyright Law in Indonesia.

Keywords : Copyright, Law protection, Houses Architecture Work.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	25
B. Pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual	29
C. Gambaran umum tentang perumahan	37
D. Kode Etik Arsitek	44
E. Undang-undang Jasa Konstruksi	46
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran umum kota Semarang	49
2. Pengaturan Hak Cipta arsitektur menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002	54
B. Pembahasan	
1. Perlindungan Hak Cipta arsitektur perumahan	68
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Karya Arsitektur Perumahan dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Karya Arsitektur Perumahan	87
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal abad 18 bangsa Eropa sudah mulai memikirkan soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini tercermin pada pameran internasional atas penemuan-penemuan baru di Vienna pada tahun 1873. Namun, beberapa negara kemudian enggan mengikuti pameran-pameran seperti itu, karena takut ide-ide baru tersebut dicuri dan dieksploitasi secara komersial di negara lain. Sejak saat itu mulai timbul kebutuhan perlindungan secara internasional atas karya intelektual. Ada sejumlah hasil penemuan baru di berbagai bidang pada abad itu antara lain beberapa disebutkan. Pada tahun 1883 Johannes Brahmas menciptakan *Symphony* ke 3. Robert Louis Stevenson menulis *Treasure Island*. John dan Emily Roebling membuat kontruksi jembatan *New York's Brooklyn*. Di bidang lain seperti teknologi dapat dilihat dari hasil temuan-temuan di bidang teknologi yang kontroversial, mengawali revolusi industri, seperti penyempurnaan prinsip kerja mesin uap oleh James Watt.¹

Kebutuhan perlindungan terhadap HKI dapat ditelusuri sejak sebelum mesin cetak ditemukan. Misalnya sudah ditemukan data perkara hak cipta tahun 567 Anno Dominum (AD) Biarawan Columba diam-diam menyalin tanpa izin kitab Mazmur ciptaan gurunya Abbot Finigan. King

¹ <http://media.isnet.org/iptek/100/watt>.

Diarmid melarang hal itu. Di sini kita melihat telah ada perlindungan terhadap ciptaan seseorang dengan alasan moral. Juga pada zaman Romawi penyair Martial syairnya dibaca tanpa ijin. Martial menamakan perbuatan orang ini sebagai plagium.²

Penemuan-penemuan baru itu, ternyata dibarengi dengan maraknya pembajakan hasil karya seni, atau pencurian ide, sehingga masyarakat merasa perlu melindungi karya-karya mereka. Karya-karya itu dihasilkan bukan tanpa kerja keras, bahkan dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya sehingga pembajakan hasil karya orang lain, atau pengambilan ide tanpa memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Landasan moral ini dalam filsafat sebagai teori hukum alam. Satu dari beberapa isinya adalah jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hakmu.

Karya intelektual yang dihasilkan manusia tidak berangkat dari nol, tetapi dihasilkan dari sesuatu hasil kerja yang sudah atau pernah ada. Artinya, karya itu bisa dihasilkan karena materinya sudah disediakan oleh alam dan kemudian diolah dan dimodifikasi oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya, atau memang sudah dibuat oleh manusia terdahulu dan disempurnakan lagi oleh manusia berikutnya. Yang sudah ada itu ditingkatkan kegunaannya sehingga mempunyai nilai lebih.

² Damian Eddy. *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*. Jakarta : Alumni, hal.. 47

Dengan alasan di atas, maka dasar pemberian hak kepada para pencipta (kreator), penemu (inventor) atau pendesain, yang hasil karyanya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat, serta kesejahteraan manusia perlu dipahami oleh masyarakat. Secara logis seharusnya dapat diterima bahwa setelah hak diberikan kepada mereka yang berprestasi, kewajiban akan timbul pada masyarakat yang berkepentingan dengan hasil karya itu untuk tidak menggunakannya tanpa hak, memalsukan, memperbanyak tanpa ijin atau mencuri idenya. Diharapkan masyarakat sadar, hal itu merugikan si pencipta, pendesain atau inventor (penemu), juga negara sehubungan dengan pajak.

Salah satu bagian dari penciptaan adalah cipta/karya arsitektur. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia tidak pernah lepas dari lingkungan karya arsitektur. Sehubungan dengan itu, sering dijumpai karya arsitektur yang amat mengecewakan terutama karya-karya yang merupakan jiplakan atau contekan dari bangunan-bangunan modern yang sudah ada di negara barat. Hal ini akan berdampak pada semakin menipis dan pudarnya arsitektur sebagai karya seni dari kebudayaan. Keadaan ini diperparah lagi dengan pelanggaran berupa pengcopian atas karya arsitektur yang dilakukan dengan, menggambar ulang secara langsung dengan mengganti nama penciptanya.

Suatu kenyataan bahwa perkembangan pembangunan semakin maju, jadi sangat dibutuhkan perlindungan hukum atas karya arsitektur untuk menghindari adanya pelanggaran hukum terhadap karya arsitektur.

Peraturan Undang-undang Hak Cipta belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap cipta karya arsitektur yaitu kriteria yang disebut sebagai pelanggaran terhadap karya arsitektur tidak jelas disebutkan di dalam Undang-undang Hak Cipta. Adapun penyebab timbulnya pelanggaran terhadap Hak cipta karya arsitektur yaitu faktor moral, kebudayaan Indonesia yang bersifat komunal, materi perundang-undangan yang belum cukup mengatur dan kesulitan dalam melakukan pembuktian. Sedangkan untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur adalah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebagai asosiasi memberikan penghargaan kepada pencipta yang karyanya dapat dikategorikan sebagai karya arsitektur yang baik dan adanya pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hak cipta karya arsitektur.

Disamping itu diperlukan usaha memasyarakatkan atau mensosialisasikan Undang-undang Hak Cipta tersebut. Hak Cipta sangat perlu diberi perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya, yang gunanya terutama untuk menjamin adanya kepastian hak agar para pencipta dapat lebih kreatif untuk menciptakan Karya arsitektur yang baik dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak pencipta, maka pelanggaran terhadap karya arsitektur dapat dibatasi.

Suatu karya arsitektur diciptakan dengan tujuan untuk memperoleh keindahan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Keindahan dalam arsitektur merupakan nilai-nilai yang menyenangkan

mata dan pikiran, meskipun sulit ditentukan ukurannya karena dipengaruhi oleh sifat subyektifitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut seorang arsitek menggunakan bentuk sebagai medianya. Selain bentuk, unsur-unsur lain yang mempengaruhi suatu karya arsitektur adalah ruang, skala, warna, tekstur, keamanan dan kenyamanan.

Suatu karya arsitektur sangat erat hubungannya dengan kebutuhan manusia, tidak hanya dari segi seni atau keindahan, tetapi juga yang terpenting adalah kebutuhan manusia atas keamanan dan kenyamanan, baik dari segi konstruksi, tata letak bangunan, efisiensi, maupun dari segi ekonomis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang arsitek diharapkan mampu untuk mewujudkannya, karena seorang arsitek dianggap mempunyai kemampuan dan keahlian dalam seni merancang atau mendesain bangunan.

Kemampuan merancang atau mendesain seorang arsitek didapat melalui suatu proses pendidikan, pelatihan, pengalaman, disiplin, sehingga merupakan suatu kewajiban jika karya cipta seorang arsitek dihargai dan dilindungi. Karena, untuk mewujudkan suatu bentuk desain yang mempunyai nilai seni perlu adanya integrasi antara alam, manusia itu sendiri, dan berfikir dalam lingkungan yang ideal sehingga dapat tercipta suatu komposisi yang harmonis.

Kata desain / *design* dalam kamus Indonesia-Inggris dari John M. Echols berarti “potongan, mode, tujuan, rencana”³ sedangkan menurut Webster adalah “gagasan awal, rancangan, perencanaan pola, susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat, pikiran, maksud, kejelasan dan seterusnya”.⁴

Perancangan atau mendesain adalah salah satu proses penciptaan suatu karya arsitektur.

“ Perancangan adalah :

1. Menemukan komponen fisik yang benar dari sebuah fisik;
2. merupakan aktifitas pemecahan problem langsung;
3. faktor kondisi bagian-bagian produksi yang mengadakan hubungan kontak dengan manusia;
4. menghubungkan produksi dengan situasi untuk memberikan kepuasan;
5. lompatan imajinasi dari fakta-fakta sekarang pada kemungkinan-kemungkinan yang akan datang;
6. hasil pemecahan optimal dari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dari suatu keadaan tertentu;
7. sebuah aktivitas yang kreatif, yang membawa ke dalam sesuatu yang baru dan berguna serta tidak ada sebelumnya”.⁵

Arsitektur dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai gaya atau bentuk bangunan, seni dan ilmu merancang, serta membuat konstruksi bangunan, metode dan gaya suatu konstruksi bangunan.

Pada umumnya arsitektur didefinisikan sebagai “ Seni penciptaan ruang dan bangunan untuk memberi wadah kepada kehidupan bersama”.⁶

Selanjutnya menurut Van Ramondt, salah seorang guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB), arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1975, hal. 177

⁴ Webster Dictionary, *Arsitektur Fawcett Crest Book*, Green Wich, 1974, hal. 207

⁵ Nur Irsyadi, et.All., *Proses Perancangan Yang Sistematis*, Djambatan, Bandung, 1982, hal. 5-6

⁶ Eko Budihardjo, *Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 75

dengan berbahagia.⁷ Arsitektur dalam pengertian diatas hanya diasosiasikan dengan penciptaan bangunan-bangunan dan ruangan-ruangan yang indah dan hanya sebagai tempat bagi kehidupan manusia.

“Arsitektur yaitu suatu seni untuk mendesain bangunan sehingga mempunyai nilai keindahan/estetika. Keindahan adalah nilai-nilai yang menyenangkan mata, pikiran dan telinga”.⁸

Menurut Hasan Purbahadiwidjojo yang dikutip oleh Eko Budihardjo, pengertian arsitektur memiliki makna yang lebih luas meliputi pembangunan lingkungan binaan (*built environment*) yang merupakan bagian dari lingkungan semesta yang telah diubah oleh manusia untuk menopang kehidupannya,⁹ yang berarti mencakup segala ruang, bangunan, prasarana, dan yang dibentuk oleh manusia.

Karena arsitektur adalah seni visual, maka syarat keindahannya harus mengandung nilai-nilai yang menyenangkan mata dan pikiran, yaitu nilai-nilai bentuk dan ekspresi yang menyenangkan.

“Keindahan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha fisik, tetapi harus juga disertai dengan usaha batin. Ini terkesan, terekspresikan apakah arsiteknya adalah seorang arsitek yang cermat atau sembarangan, miskin atau kaya ide-ide”.¹⁰

“Keindahan bentuk lebih banyak berbicara mengenai sesuatu yang lebih nyata yang terdiri dari keterpaduan proporsi, keseimbangan, skala

⁷ Hendraningsih, *Peran, Kesan, dan Bentuk-bentuk Arsitektur*, Djambatan, Bandung, 1985, hal. 5

⁸ H.K. Ishar, *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama,, Jakarta, 1985, hal. 75

⁹ Eko Budihardjo, *Op.Cit.*, hal. 5

¹⁰ *Ibid*, hal. 76

dan irama, sedangkan keindahan ekspresi bersifat abstrak terdiri dari syarat urutan karakter, gaya dan warna”.¹¹

Arsitek itu sendiri dalam kamus ilmiah populer diartikan sebagai ahli bangunan, ahli perancang (pendesain) bangunan atau pakar arsitektur.

“Arsitek adalah selaku profesional yang merancang pekerjaan untuk kepuasan dan keuntungan para investor, yang didalamnya terdapat perpaduan kecakapan teknik dan kematangan etik yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman dan disiplin yang harus disertai pula mental, etik dan moral yang kuat, tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga mempertaruhkan kualitas dan harkat pribadinya”.¹²

Kepemilikan atas suatu karya arsitektur baik yang dianggap sebagai suatu karya seni ataupun tidak oleh masyarakat merupakan hak mutlak dari para arsitek, hak milik tersebut meliputi semua sketsa-sketsa, gambar-gambar rancangan, dan rencana anggaran biaya yang asli.¹³ Suatu karya arsitektur merupakan karya seni yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, untuk karya seni yang lain seperti lukisan misalnya, seseorang harus melakukan suatu upaya untuk bisa menikmatinya seperti mengunjungi pameran lukisan, atau mengunjungi museum, sedangkan untuk suatu karya arsitektur kita dapat dengan mudah menikmatinya karena keberadaannya ada didepan kita atau disekitar kita, baik itu berupa bangunan dengan gaya arsitektur modern,

¹¹ ibid, hal. 78

¹² Ibid, hal. 146

¹³ Ikatan Arsitek Indonesia, *Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pemberi Tugas*, Pasal 13 huruf a

maupun bangunan-bangunan tua peninggalan jaman kolonial yang mempunyai gaya, bentuk yang unik serta memiliki nilai seni yang tinggi.

Arsitektur sebagai suatu karya seni “hanya bisa tercapai dengan dukungan masyarakat yang luas, berbeda dengan karya seni lukis atau patung”.¹⁴

Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peranan para arsitektur yang menghasilkan karya-karya hak cipta dibidang arsitektur, hal ini dapat terlihat dengan jelas terutama pembangunan aspek fisiknya, dimana banyak sekali terdapat bangunan-bangunan indah dan megah dengan gaya arsitektur yang bervariasi antara satu dengan yang lain. Konstruksi bangunan tersebut dapat berupa rumah tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, dan lainnya, yang mempunyai nilai artistik yang khas dan unik dengan gaya-gaya arsitektur yang indah.

Salah satu bentuk karya arsitektur yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah rumah tinggal atau secara umum dapat disebut sebagai perumahan. Bentuk-bentuk indah karya perumahan yang dibuat, merupakan salah satu nilai jual yang penting. Sayangnya dalam perkembangan, desain-desain perumahan yang ditawarkan adalah nyaris sama. Apakah karena alasan sedang mengikuti trend atau sekedar menjiplak karya orang lain?. Hal ini tidak dapat dijelaskan secara gamblang. Terkadang bahkan terjadi pengotakkan desain terhadap

¹⁴ Eko Budihardjo, *Menuju Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 107

kategori perumahan yang disesuaikan dengan ditujukan bagi kalangan apakah perumahan tersebut. Sedikit contoh yang sedang marak saat ini adalah desain yang minimalis ditawarkan oleh perumahan bagi kalangan menengah ke bawah dan desain *European, Cluster, Mediteranian* bagi perumahan kalangan menengah ke atas. Dan anehnya, selalu ada kemiripan di antara desain-desain yang ditawarkan oleh developer-developer perumahan tersebut.

Terkadang, hal ini disebabkan karena pengaruh tuntutan masyarakat yang mengikuti perkembangan. Dapat disimpulkan bahwa karya arsitektur dikatakan sebagai suatu karya seni tergantung pada masyarakat, masyarakatlah yang menentukan atau menilai suatu karya arsitektur tersebut merupakan suatu karya seni atau bukan, karena arsitektur merupakan suatu karya manusia untuk manusia.

Oleh karena itu, hukum sebagai bagian dari peradaban manusia juga dituntut untuk terus menerus berubah sehingga mampu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum yang berisi norma-norma dan kaedah-kaedah diharapkan mampu mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam menghadapi tuntutan dan tantangan jaman.

Menghadapi kenyataan tersebut peranan hukum semakin penting dalam rangka menguatkan tujuan pembangunan, karena dalam pembangunan terdapat hal-hal yang harus diperlihara serta dilindungi, salah satunya adalah karya intelektual yang merupakan aset atau kekayaan bangsa.

Indonesia memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan berbagai pengembangan-pengembangannya, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

Kecerdasan intelektual suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara, dan kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi, serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi harus dilindungi¹⁵

Untuk dapat melahirkan suatu karya yang mempunyai nilai seni yang tinggi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, seseorang memerlukan pengorbanan baik waktu, biaya, tenaga, maupun pikiran, sehingga sudah merupakan suatu keharusan jika haknya dirumuskan sebagai *property rights* (hak milik) yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang tinggi dalam wujud perlindungan hukum.

Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang kompetitif, dapat meningkatkan pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan budaya, serta dapat mengembangkan pengembangan produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya.

¹⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 56

Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta di Indonesia, dan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi pencipta, pemilik hak yang berkaitan, dan keseimbangan dalam masyarakat, maka dirumuskan suatu undang-undang tentang hak cipta. Undang-undang Hak Cipta tersebut semula diatur dengan UU No. 6 Tahun 1982 yang mengakhiri berlakunya *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600.

Atas desakan masyarakat internasional dan kebutuhan perlindungan hukum di Indonesia maka UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 direvisi dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian dirubah dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan selanjutnya diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam konsideran UU Hak Cipta dinyatakan bahwa, Undang-undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978, khususnya pembangunan di bidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya, dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.¹⁶

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing*

¹⁶ Ibid, Hal 56

The World Trade Organization) yang didalamnya tercakup persetujuan *TRIPs (Trade On Related Intellectual Property Rights)* mengharuskan pula Indonesia untuk meratifikasi konvensi *Bern* dan *WIPO Copy Rights Treaty*, oleh karena itu Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang nasional di bidang hak cipta termasuk hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku, mengandung pengertian bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta, karena hak tersebut timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.¹⁷

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa salah satu karya intelektual hak cipta yang

¹⁷ ibid hal. 63

dilindungi adalah karya arsitektur, yang meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

Akan tetapi patut disayangkan bahwa ternyata sampai saat ini belum terdapat kejelasan tentang prosedur perlindungan terhadap karya arsitektur. Berdasarkan uraian di atas, terlihat betapa pentingnya sebuah karya arsitektur untuk dilindungi. Sampai saat ini perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur dinilai masih rancu. Karna di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tidak dijelaskan lebih lanjut, bagaimana dapat dikatakan terjadi pelanggaran hak cipta sebuah karya arsitektur.

Dalam ketentuan UU Hak Cipta disebutkan bahwa penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk pengaliwujudan secara permanen atau temporer merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Perubahan terhadap karya arsitektur menurut ketentuan UU Hak Cipta Pasal 15 huruf f UU No. 19 tahun 2002, hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis. Yang dimaksud pertimbangan teknis adalah pertimbangan mengenai persyaratan teknis bangunan yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Penjelasan yang sebenarnya kurang begitu jelas mengingat di dalam penjelasan tersebut tidak disebutkan barometer penilaian kapan hak cipta sebuah karya arsitektur dilanggar.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut tentang perlindungan hak cipta arsitektur perumahan berdasarkan pengaturannya dalam UU Hak Cipta.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak cipta arsitektur perumahan di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat perlindungan terhadap hak cipta karya arsitektur perumahan dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji perlindungan hak cipta arsitektur di Indonesia.
2. Untuk menganalisa faktor-faktor indikasi penghambat perlindungan karya arsitektur perumahan dan upaya penanggulangannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan hokum ini adalah sebagai berikut :

1. Akademisi

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat untuk melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan Hukum Kekayaan Intelektual serta pengembangannya.

2. Praktis

- a. Memberikan gambaran tentang perlindungan hak cipta arsitektur di bidang perumahan.
- b. Dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya dalam rangka memajukan bidang perlindungan hak cipta yang dalam perkembangannya menjadi hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat menjadi masukan bagi semua masyarakat khususnya arsitek ataupun profesional lain dalam bidang perumahan, sehingga dapat dijadikan sebagai wacana tentang pentingnya arti sebuah perlindungan hak cipta arsitektur.

E. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- 1) Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
- 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
- 3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁸

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan-laporan.¹⁹

“Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam membangun ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah”.²⁰

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah.²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-PRESS, 2005) Hal.. 5

¹⁹ Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 1

²⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 1

²¹ H. Hadari Nawawi, Tanpa Tahun, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 9

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa kegiatan penelitian seseorang dimulai ketika ia melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode, karena dalam proses inilah timbul preferensi seseorang terhadap teori-teori dan metode-metode tertentu. Pada hakekatnya metodologi tersebut memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya, sehingga diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, dan menganalisa suatu masalah tertentu dan pada akhirnya diharapkan mampu menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan tentunya penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang bersifat ilmiah. Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai tata ilmiah, yang disertai dengan status keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.

Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran

dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.²²

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris, maksudnya dalam mengadakan pendekatan untuk membahas permasalahan digunakan data dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat²³. Di samping itu berusaha menganalisa kenyataan dalam praktek tentang perlindungan hak cipta arsitektur bidang perumahan, permasalahan yang dihadapi berdasarkan data-data di lapangan.

Aspek yuridis digunakan sebagai acuan dalam menilai atau menganalisis permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris adalah yang terkait dengan pelaksanaan peraturan-peraturan hukum, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai korelasi dengan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Arsitektur khususnya di bidang perumahan.

Jadi pendekatan yuridis empiris adalah merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat dalam hal ini perilaku yang dilakukan oleh para profesional.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, hal. 15

²³ Ibid., hal. 52

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif artinya, penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Bersifat analitis karena mengandung makna, mencari, mengelompokkan dan membandingkan antara data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan dengan data primer, yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dari hasil analitis tersebut diharapkan dapat memberikan dan memperoleh suatu kesimpulan yang mendalam mengenai judul yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian ini merupakan suatu penelitian untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan upaya perlindungan hak cipta arsitektur, khususnya perumahan di kota Semarang dan berbagai masalah yang dihadapi, kemudian dari data-data yang diperoleh akan dilakukan analisa yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan di kota Semarang.

4. Metode Penyajian Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer yang mana dilengkapi analisisnya dengan data sekunder.

4.1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan cara wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung secara terpimpin. Dalam hal ini dipersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan dan out line sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

4.2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan subyek dan permasalahan yang diteliti. Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan :

4.2.1. Bahan hukum primer :

Adalah bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4.2.2. Bahan hukum sekunder :

Adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan

hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

4.2.3. Bahan hukum tersier :

Adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk atau informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, surat kabar, dan media informasi lainnya. Bahan hukum ini digunakan untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data-data tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisa data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data yang diperlukan melalui penelitian lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

5.1. Studi Kepustakaan (*library research*) :

Merupakan studi kepustakaan yang diperoleh melalui cara melakukan inventarisasi atau pencatatan atau recording terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya ilmiah sarjana dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang

diteliti. Untuk mendapatkan data yang lengkap, diperlukan data yang bersifat sekunder dan primer.

5.2. Studi Lapangan (*field research*) :

Yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak yang terkait dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya arsitektur perumahan untuk memperoleh dan menghimpun data primer, atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti, yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara. Narasumber yang dimaksud diantaranya : Ketua IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) Semarang, Anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K), Bagian Perencanaan dan Perizinan Dinas Tata Kota Semarang dan beberapa arsitek kota Semarang.

6. Metode Analisa Data

Data yang diperlukan akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dijabarkan dan dianalisa secara kualitatif berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan agar mencapai kejelasan masalah pelaksanaan perlindungan hak cipta karya arsitektur khususnya bidang perumahan. Selanjutnya disusun dalam karya ilmiah. Data-data yang telah terkumpul diteliti dan dianalisa dengan menggunakan metode berpikir

yang mendasarkan dari suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil.

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) – badan dunia di bawah naungan PBB untuk isu HKI, hak kekayaan intelektual terbagi atas 8 kategori, yaitu:

1. Hak Kekayaan Industri

Kategori ini mencakup penemuan (paten), merek, desain industri, dan indikasi geografis. Dari sumber situs *WTO*, masih ada hak kekayaan intelektual lainnya yang termasuk dalam kategori ini yaitu rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu.

2. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan istilah legal yang menjelaskan suatu hak yang diberikan pada pencipta atas karya literatur dan artistik mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah kreativitas. Karya-karya yang dicakup oleh Hak Cipta termasuk: karya-karya literatur seperti novel, puisi, karya pertunjukan, karya-karya referensi, koran dan program komputer, data-base, film, komposisi musik, dan koreografi, sedangkan karya artistik seperti lukisan, gambar, fotografi dan ukiran, arsitektur, iklan, peta dan gambar teknis. Kategori ini mencakup karya-karya literatur dan artistik seperti novel, puisi, karya panggung, film, musik, gambar, lukisan, fotografi dan patung, serta desain arsitektur. Hak yang berhubungan dengan hak cipta termasuk artis-artis yang beraksi dalam sebuah pertunjukan, produser fonogram dalam rekamannya, dan penyiar-penyiar di program radio dan televisi.

3. Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan, dapat berupa produk atau proses secara umum, suatu cara baru untuk membuat sesuatu atau menawarkan solusi atas suatu masalah dengan teknik baru. Paten memberikan perlindungan terhadap pencipta atas penemuannya. Perlindungan tersebut diberikan untuk periode yang terbatas, biasa-nya 20 tahun. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah penemuan tersebut tidak dapat secara komersil dibuat, digunakan, disebarakan atau di jual tanpa izin dari si pencipta.

4. Merek

Merek adalah suatu tanda tertentu yang dipakai untuk mengidentifi-kasi suatu barang atau jasa sebagai-mana barang atau jasa tersebut dipro-duksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Merek membantu konsumen untuk mengidentifikasi dan membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan karakter dan kualitasnya, yang dapat teridentifikasi dari mereknya yang unik.

5. Desain Industri

Desain industri adalah aspek ornamental atau estetis pada sebuah benda. Desain tersebut dapat mengandung aspek tiga dimensi, seperti bentuk atau permukaan benda, atau aspek dua dimensi, seperti pola, garis atau warna. Desain industri diterapkan pada berbagai jenis produk industri dan kerajinan; dari instrumen teknis dan medis, jam tangan, perhiasan, dan benda-benda mewah lainnya; dari peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik ke kendaraan dan struktur arsitektural; dari desain tekstil hingga barang-barang hiburan. Agar terlindungi oleh hukum nasional, desain industri harus terlihat kasat mata. Hal ini berarti desain industri pada prinsipnya merupakan suatu aspek estetis yang alami, dan tidak melindungi fitur teknis atas benda yang diaplikasikan.

6. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasar tempat asalnya itu. Pada umumnya, Indikasi

Geografis merupakan nama tempat dari asal barang-barang tersebut. Produk-produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal yang spesifik, seperti iklim dan tanah. Berfung-sinya suatu tanda sebagai indikasi geografis merupakan masalah hukum nasional dan persepsi konsumen.

7. Rahasia Dagang

Rahasia dagang dan jenis-jenis informasi rahasia lainnya yang memiliki nilai komersil harus dilindungi dari pelanggaran atau kegiatan lainnya yang membuka rahasia praktek komersial. Namun langkah-langkah yang rasional harus ditempuh sebelumnya untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia tersebut. Pengujian terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah sebagai langkah memperoleh persetujuan untuk memasarkan produk farmasi atau pertanian yang memiliki komposisi baru juga harus dilindungi dari kecurangan perdagangan.

8. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta di-bentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi-konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

B. Pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual

Pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual sulit diutarakan secara gamblang, karena sangat luas. Penjelasan tentang hal ini perlu kita ketahui mulai dari istilahnya, kemudian definisi, dan pemahaman secara hukum.

1. Istilah

Istilah dan penyebutan semua hak hasil karya intelektual sebagai satu kesatuan berkembang terus dari waktu ke waktu. Terutama setelah *Intellectual Property Rights* (IPR) diterjemahkan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan masuk dalam khasanah perundang-undangan Indonesia. Sebelumnya para pakar hukum Indonesia, seperti Sudargo Gautama, Bapak Hukum Perdata Internasional Indonesia dalam bukunya Undang-Undang Merek Baru tahun 2000 menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Istilah ini kemudian menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sebagian menulis HaKI. Mengapa digunakan huruf a kecil? Ada pendapat yang mengatakan bahwa penulisan inisial dari singkatan preposisi dalam bahasa Indonesia tidak seharusnya ditulis dengan huruf besar.

Kemudian, di awal tahun 2001 para pakar bidang kekayaan intelektual dalam seminar-seminar mulai menggunakan istilah baru, yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang secara resmi digunakan dalam Keputusan

Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M/03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Aparatur Negara dalam Surat No. 24/M/PAN/1/2000. Bahkan pada sekitar tahun 2007/2008 ada yang sudah mulai menggunakan istilah Kekayaan Intelektual (KI) saja. Sampai saat ini belum ada istilah yang digunakan secara umum dan baku. Namun, yang terpenting dipahami adalah maksudnya yang sama, yaitu hak yang diberikan kepada kaum intelektual berkaitan dengan atau mengenai kekayaan intelektual bukan mengenai hal lain.

2. Definisi

Hak Kekayaan Intelektual sulit didefinisikan secara menyeluruh, karena banyak bentuknya dan luas obyeknya. Seperti diketahui bahwa ruang lingkup HKI secara umum dapat dibagi dalam dua bidang yaitu bidang karya cipta dan hal-hal terkait; dan di bidang industri. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai badan khusus PBB yang memiliki otoritas di bidang *Intellectual Property Rights* (IPR) memberi definisi sebagai berikut.

***”Very broadly, intellectual property means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields”.*²⁴**

Rumusan sederhana yang dapat digunakan untuk pemahaman awal, walau deskripsi ini belum menghadirkan definisi HKI secara holistik dan sempurna, adalah sebagai berikut. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan negara kepada intelektual yang menghasilkan karya di bidang kekayaan intelektual, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait, sebagai penghargaan, pengakuan hak dan sarana perlindungan hukum. Apa pemahaman hak yang diberikan secara langsung atau otomatis?. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Hak ini diberikan sangat terbatas dananya kepada pencipta hasil seni dan sastra serta ilmu pengetahuan; di samping karya di bidang rahasia dagang. Hak dan perlindungan langsung diberikan ketika hasil suatu ide diwujudkan dalam bentuk

²⁴ World Intellectual Property Organization, Intellectual Property Reading Material, WIPO Publication No. 476 (E), Geneve, 1995, hlm 5 .

nyata. Dapat dilihat, didengar atau dinikmati oleh orang lain dan dipublikasikan. Contohnya adalah karya seni musik lagu, atau metode-metode di bidang rahasia dagang seperti resep makanan, metode penjualan dsb.

Secara "*otomatis*" artinya tidak perlu melalui pendaftaran untuk mendapat perlindungan dan pengakuan haknya. Sedangkan hak yang harus dimohonkan kepada negara (instansi terkait) melalui "*pendaftaran*", contohnya adalah hak paten. Si inventor (penemu) setelah melakukan pendaftaran; invensinya memenuhi syarat dan lulus uji laboratorium; dan dikabulkan permohonannya akan menerima sertifikat hak paten. Pengakuan hak dan perlindungan hukum baru ada setelah hal itu dimohonkan dan didaftar serta dikabulkan oleh instansi terkait.

3. Pemahaman secara hukum

Hukum yang mengatur soal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu fenomena yang relatif masih baru bagi banyak negara di dunia terutama negara

berkembang²⁵. Pemahaman teori Hak Kekayaan Intelektual belum banyak diketahui oleh masyarakat. Di sini akan diuraikan pemahaman konsepsi hak kekayaan intelektual dari unsur-unsur yang ada dalam istilah HKI yaitu, (1) hak, (2) kekayaan dan (3) intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dipisah satu dengan lainnya.

Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama, Unsur Hak.* Hak yang dimaksud di sini adalah hak yang diberikan negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan aset. Menurut hukum perdata²⁶ hak yang melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan. Hak yang mempunyai sifat kebendaan disebut Hak Kebendaan dan

²⁵ Venantia. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Hukum Dalam Bisnis, Buku Ajar Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya. 2006, hal.. 97.

²⁶ Subekti, R dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cetakan ke empat belas, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak kebendaan itu yang dalam urutannya terletak paling atas dan paling sempurna, disebut hak milik.²⁷ Pasal 499 KUHPerdata adalah dasar hukum atas hak kebendaan yang dapat dikuasai dengan hak miliki. Dijelaskan dalam pasal ini bahwa yang dimaksud dengan kebendaan dapat berupa barang, jasa atau hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik. Hak milik adalah hak yang absolut artinya (1) hak yang harus dihormati oleh semua orang; selama tidak terdapat hubungan hukum tertentu tidak dapat diganggu gugat; dan dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang menggunakan tanpa hak. (2) mempunyai sifat “melekat”, mengikuti benda itu bila dipindahtangankan (*droit de suite*). Dan (3) mempunyai sifat “*droit de preference*” (hak untuk didahulukan).

Selain hal di atas, benda di dalam Hukum Perdata dibagi menjadi beberapa kategori. Namun, yang terpenting di sini adalah pembagian benda menjadi benda bergerak

²⁷ Di samping hak milik, ada hak-hak lainnya yang mempunyai sifat terbatas, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan lain-lain yang mengatur soal tanah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria.

(tidak tetap) dan benda tidak bergerak (tetap). Benda bergerak atau benda tidak tetap contohnya adalah mobil, perhiasan, furniture, dan lain-lain. Benda tetap contohnya adalah tanah, rumah, dan lain-lain. Kategori benda bergerak dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud contohnya adalah piutang, hak atas paten, hak cipta, dan lain-lain. Hukum Perdata tidak mengatur tentang ini. Hak-hak itu seperti dikatakan Roscoe Pound sebagai *immateriel*. Atas pembagian itu Hak Kekayaan Intelektual dipahami sebagai benda bergerak tidak berwujud atau immateriel dan *intangible*.

Hak kekayaan Intelektual dianggap benda bergerak tidak berwujud karena sifatnya yang dapat dipindahkan seperti benda-benda lainnya; dan bentuknya abstrak, tidak dapat dilihat dan diraba. Karena sifat kebendaan itu hak Kekayaan Intelektual dapat dimiliki oleh subyek hukum, orang maupun badan hukum; atau dialihkan kepada pihak lain. Pasal 570 KUHPerdata (Buku II tentang Kebendaan) memberi pengertian tentang hak milik sebagai berikut.

”hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu atau tindakan pembatasan lainnya demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang, dan atau dengan pembayaran ganti rugi”.

Pemahaman tentang hak milik memang memang masih banyak mengundang permasalahan kontradiksi dan sulit didefinisikan secara baku, karena para ahli masih mempunyai pendapat masing-masing. Di samping itu ada kekeliruan penggunaan istilah hak milik. Misalnya umum mengartikan milik sebagai harta benda. Sedangkan ahli hukum dan filsafat mengartikan milik diidentikan dengan milik pribadi, suatu hak yang eksklusif. Hak orang untuk mengesampingkan yang lain dalam hal penggunaan dan

memanfaatkan sesuatu. Pemahaman hak milik yang terkandung di dalam hak kekayaan intelektual adalah hak milik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi juga termasuk desain dan informasi yang berawal dari suatu ide. Ini berarti perlindungan diberikan kepada kemampuan intelektual yang dicurahkan dari bentuk ide, gagasan ke dalam bentuk nyata, baik baru (orisinil) maupun pengembangan lebih lanjut yang dapat dilihat, dinikmati, didengar, dirasakan, dibaca dll. *Kedua*, unsur kekayaan.

Menurut V. Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu hukum menjelaskan bahwa Hukum Kebendaan merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Kekayaan menurut Paul Scholten dalam *Zaakenrecht* adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Ini berarti bahwa unsur kekayaan pada hak kekayaan intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial.

Menurut ilmu pengetahuan hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. *Ketiga*, unsur intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan; atau yang mempunyai kecerdasan tinggi. Bahasa Indonesia memberi pengertian intelektual adalah cendekiawan atau orang yang memiliki sikap hidup yang terus menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu. Dari ketiga unsur pemahaman itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta rasa dan karsa. Pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai.

Nilai ekonomi yang melekat menimbulkan konsepsi kekayaan (*property*). Dengan konsep kekayaan maka perlu perlindungan hukum dan hak. Perlu dipertahankan

keberadaannya terhadap siapa saja. Ketiga hal ini merupakan landasan konsepsi HKI. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-undang Merek (1885), Paten (1885), Hak Cipta (1921).

Ketika masih dalam penjajahan Hindia Belanda, Indonesia telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak 1888, anggota *Madrid Convention* dari 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak 1914. Pada zaman pendudukan Jepang 1942 – 1945, semua peraturan di bidang HKI tersebut di atas tetap berlaku sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan berjalannya waktu dan adanya tuntutan dari masyarakat internasional, bahwa Indonesia selain harus melindungi HKI warganegaranya

juga dari negara-negara anggota WTO lainnya (TRIPS: prinsip *nasional treatment*).

Di Indonesia saat ini berlaku tujuh (7) undang-undang yang melindungi HKI yaitu:

- a. Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- d. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.
- e. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- f. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri.
- g. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Ke tujuh undang-undang ini akan efektif berlaku bila digunakan oleh para inventor, kreator, pendesain untuk melindungi haknya. Bila tidak digunakan sesuai dengan

pasal undang-undang terkait, karyanya akan sulit memperoleh perlindungan dari perangkat hukum HKI.

C. Gambaran Umum Tentang Perumahan

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan permukiman, bahwa pengertian perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan pengertian permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian atau tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Untuk membuat sebuah perencanaan perumahan dan permukiman yang betul-betul dapat menjawab tuntutan pembangunan perumahan dan permukiman maka perlu di pertimbangkan secara matang aspek-aspek perencanaannya. Keberhasilan pembangunan perumahan sebagai bagian dari program pembangunan nasional memang tidak lepas dari aspek-aspek perencanaan yang harus di penuhi. Aspek-aspek yang mendasari perencanaan perumahan tersebut meliputi :

a. Lingkungan

Hal utama yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan perumahan adalah manajemen lingkungan yang baik dan terarah, karena

lingkungan suatu perumahan merupakan faktor yang sangat menentukan dan keberadaanya tidak boleh diabaikan. Hal tersebut dapat erhadi karena baik buruknya kondisi lingkungan akan berdampapk pada pernghuni perumahan.

b. Daya Beli (*Affordability*)

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat antara lain :

1. Pendapatan perkapita sebagian besar masyarakat yang masih relatif rendah (di bawah standar)
2. Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat terutama di daerah pedesaan masih relatif rendah.
3. Pembangunan yang belum merata pada berbagai daerah sehingga berdampak pada timbulnya kesenjangan sosial dan ekonomi, dimana hal ini berdampak pada persaingan antara golongan yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah, seolah-olah fasilitas dan kemajuan pembangunan (termasuk perumahan) hanya dapat dinikmati oleh kaum yang berpenghasilan tinggi saja.
4. Situasi politik dan keamanan cenderung tidak stabil sehingga memepengaruhi minat dan daya beli masyarakat untuk berinvestasi dan mengembangkan modal.

5. Inflasi yang tinggi menyebabkan naiknya harga bahan bangunan, yang berdampak pada melambungnya harga rumah , baik untuk kategori rumah sederhana, menengah maupun mewah.

c. Kelembagaan

Keberhasilan pembangunan perumahan dalam suatu wilayah baik di kota maupun di pedesaan tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya keberhasilan itu. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan memegang peran penting dalam setiap program pembangunan yang dijalankan. Sedangkan peran swasta (sebagai pengembang) sangatlah menentukan terciptanya arah dan laju pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera dengan tercukupinya segala kebutuhan perumahan.

Permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman hingga kini masih terjadi, meskipun pembangunan perumahan dan permukiman sudah dicanangkan sejak masa Orde Baru. Faktor-faktor dari masalah-masalah tersebut adalah :

- a. Faktor Ekonomi dan Sosial
- b. Laju Pertumbuhan Penduduk yang Tidak terkendali
- c. Tingginya Angka Urbanisasi
- d. Laju Inflasi yang Tinggi

Menurut John Turner dalam ASPI (2001) pola pelaksanaan pengadaan perumahan terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. Pembangunan Formal

Merupakan sistem pembangunan perumahan yang proses perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan dilakukan oleh institusi formal seperti pemerintah atau pengembang swasta. Perumahan formal bersifat massal, mempunyai standar baku dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan standar serta didukung oleh pembiayaan dari institusi formal (perbankan), teknologi canggih dan tukang yang terampil.

2. Pembangunan Non-Formal,

Berupa suatu siklus pembangunan perumahan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan dilakukan oleh penghuni atau lembaga informal (*Locally Governing Or Autonomous Teoriting System*). Perumahan informal biasanya dibangun secara individu tanpa terikat pada standar baku dan dibangun tergantung pada tingkat kemampuan dan kebutuhan penghuni.

Tingkatan kebutuhan manusia terhadap hunian dapat dikategorisasikan sebagai berikut :

1. *Survival Needs*

Tingkatan kebutuhan yang paling dasar ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pertama kali. Pada tingkatan ini hunian

merupakan sarana untuk menunjang keselamatan hidup manusia (selamat dan tetap hidup, terlindung dari gangguan iklim maupun makhluk hidup yang lain).

2. *Safety and Security Needs*

Pada tingkatan ini hunian merupakan sarana perlindungan untuk keselamatan anggota badan dan hak milik.

3. *Affiliation Needs*

Pada tingkatan ini hunian merupakan sarana agar dapat diakui sebagai anggota dalam golongan tertentu. Hunian disini berperan sebagai identitas seseorang untuk diakui dalam golongan masyarakat.

4. *Esteem Needs*

Pada tingkatan ini hunian merupakan sarana untuk mendapatkan pengakuan atas jati dirinya dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Rumah dianggap sudah bukan sebagai kebutuhan primer tetapi sudah meningkat kepada kebutuhan yang lebih tinggi dan harus dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi.

5. *Cognitive and Aesthetic Needs*

Pada tingkatan ini hunian tidak saja merupakan sarana peningkatan kebanggaan dan jati diri, tetapi juga agar dapat dinikmati keindahannya.

Eko Budihardjo menambahkan bahwa untuk dapat membangun perumahan (baru) dan pengembangan kawasan permukiman (lama) terdapat lima faktor yang harus diperhatikan. Kelima faktor tersebut adalah

:²⁸

1. Alam, antara lain yang menyangkut tentang :
 - Pola tata guna tanah
 - Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam
 - Daya dukung lingkungan
 - Taman, area rekreasi/olahraga
2. Manusia, antara lain yang menyangkut tentang :
 - Pemenuhan kebutuhan fisik/fisiologis
 - Penciptaan rasa aman dan terlindung
 - Rasa memiliki lingkungan (handarbeni)
 - Tata nilai, estetika
3. Masyarakat, antara lain yang menyangkut tentang :
 - Partisipasi masyarakat
 - Aspek hukum
 - Pola kebudayaan
 - Aspek sosial ekonomi
 - Kependudukan
4. Wadah/sarana kegiatan, antara lain yang menyangkut tentang :
 - Pelayanan umum, seperti puskesmas, sekolah, dll
 - Fasilitas umum, seperti toko, pasar, gedung pertemuan
5. Jaringan Prasarana, antara lain yang menyangkut tentang :
 - Utilitas, seperti air, listrik, gas, air kotor
 - Transportasi
 - Komunikasi

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, perumahan dapat diartikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk

²⁸ Budihardjo, Eko. 1997. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm. 64 - 65

mengembangkan kehidupan dan penghidupan keluarga, serta menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat dalam lingkup terbatas. Perumahan memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya, dimana karakteristik perumahan di suatu lokasi dapat mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.

D. Kode Etik Arsitek Indonesia

Dalam menjalankan profesinya, arsitek memiliki panduan yang tertuang dalam kode etik arsitek. Untuk setiap tindakan maupun perkataan seorang arsitek harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan kode etik yang berlaku.

Kode etik ini harus diterapkan, dan apabila dilanggar, maka terdapat sanksi. Hak dan kewajiban seorang arsitekpun diatur berdasarkan kode etik ini. Berikut adalah isi dari kode etik arsitek Indonesia :

Mukadimah

Menyadari Profesinya yang luhur, Arsitek membaktikan diri dalam bidang Perencanaan, Perancangan dan Pengelolaan Lingkungan Binaan dengan seluruh

pengetahuan, keterampilan dan rasa tanggung jawab yang dimilikinya.

Profesi yang berada di garda depan kebudayaan manusia ini mendorong Arsitek untuk bersama-sama dengan profesi lainnya, menjaga dan memelihara kemajuan perkembangan dan pertumbuhan kebudayaan agar intinya tetap berada pada jalur yang positif.

Dengan mengaku diri Profesional atas kehendaknya sendiri, Arsitek menyadari keharusan untuk tunduk kepada seperangkat kewajiban-kewajiban etis, sebagai landasan yang mengikat serta sekaligus pedoman pola berfikir, bersikap dan berperilaku dalam menjalankan tugas-tugas keprofesiannya.

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Ikatan Arsitek Indonesia merumuskan Kode Etik Arsitek sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam menunaikan tugas profesional yang dipercayakan kepadanya, seorang Arsitek bertanggung jawab kepada diri sendiri dan mitra kerja, profesi dan ilmu pengetahuan,

masyarakat dan umat manusia serta bangsa dan negara, sebagai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Dalam menunaikan tugas, seorang Arsitek membaktikan seluruh kemampuan keterampilan, pengetahuan, dan perasaan yang dimilikinya di dalam proses pembangunan demi kesejahteraan umat manusia lahir dan batin, dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap.

Pasal 3

Seorang Arsitek harus menempatkan diri, menata pemikiran dan hasil karyanya, bukan sebagai tujuan melainkan sarana yang digunakan secara maksimal dalam mencapai tujuan kemanusiaan dengan berupaya hemat sumber daya serta menghindari dampak negatif.

Pasal 4

Atas dasar kepercayaan akan keutuhan integritas, keahlian, kejujuran, kearifan dan rasa sosial yang dilimpahkan kepadanya, maka seorang Arsitek mendahulukan tanggung

jawab dan kewajiban daripada hak dan kepentingan diri sendiri.

Pasal 5

Tanpa mengurangi hak dan kepentingan pemberi tugas, seorang Arsitek berusaha memahami dan memperjuangkan kepentingan umat manusia dan masyarakat pemakai, sekalipun pihak ini bukan pemberi imbalan jasa secara langsung.

Pasal 6

Arsitek sebagai budayawan harus berupaya mengangkat nilai-nilai sosial budaya melalui karyanya dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan teknis.

Pasal 7

Pada tahap manapun dalam proses pembangunan Arsitek harus menunaikan tugasnya secara bijak dan konsisten.

E. Undang-undang Jasa Konstruksi

Dalam pembangunan sebuah bangunan, seorang arsitek juga harus berpatokan pada Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional, yaitu untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi berperan erat dengan pekerjaan arsitektural.

Pekerjaan arsitektural mencakup antara lain: pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi. Pekerjaan sipil mencakup antara lain: pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan. Pekerjaan mekanikal dan elektrik merupakan pekerjaan pemasangan produk-produk rekayasa industri. Pekerjaan mekanikal mencakup antara lain : pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas. Pekerjaan elektrik mencakup antara lain : pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya. Pekerjaan tata lingkungan mencakup antara lain: pekerjaan pengolahan dan penyatuan akhir bangunan maupun lingkungannya.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, pada, di bawah tanah dan/atau air. Dalam pengertian menyatu dengan tempat kedudukan terkandung makna bahwa proses penyatuannya dilakukan melalui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pengertian menyatu dengan tempat kedudukan tersebut dalam Pelaksanaannya perlu memperhatikan adanya asas pemisahan horisontal dalam pemilikan hak atas tanah terhadap bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana asas hukum yang dianut dalam Undang-undang mengenai agraria. Hasil pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik lain, antara lain: dokumen, gambar rencana, gambar teknis, tata ruang dalam (interior), dan tata ruang luar (exterior), atau penghancuran bangunan (demolition).

Dalam Pasal 22 ayat (3), dapat dimaknai bahwa Kekayaan Intelektual adalah hasil inovasi perencanaan konstruksi dalam suatu Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian-bagiannya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan. Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang sudah dipatenkan harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlihat di sini bahwa hak atas kekayaan intelektual dijunjung tinggi dalam jasa konstruksi yang mana ditujukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan di dalamnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum kota Semarang

Secara geografis Semarang terletak antara garis $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ - $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Letak Kota Semarang hampir berada di tengah bentangan panjang kepulauan Indonesia dari arah Barat dan Timur. Sedangkan ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75-348,00 meter diatas garis pantai dan secara umum kemiringan tanah berkisar antara 0 % sampai 40 % (curam).

Topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan, yang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah, dan daerah pantai. Daerah pantai 65,22 % diwilayahnya dataran dengan kemiringan 25 %, dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40 %.

Kota Semarang mempunyai ketinggian sekitar 0,75-384 meter di atas permukaan laut (MDPL), pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90348 meter di atas permukaan laut (MDPL) yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai

ketinggian 0,753,5 MDPL. Bagian utara Kota Semarang merupakan daerah pantai dan dataran rendah yang dikenal dengan Kota Bawah, sedangkan bagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dan daerah perbukitan yang biasa dikenal dengan Semarang Atas atau Kota Atas.

Keadaan ini membuat Kota Semarang memiliki daya tarik tersendiri, jika kita berada di Kota Atas pada malam hari maka kita akan menyaksikan keindahan panorama kota bawah yang pada malam hari akan terlihat gemerlap oleh lampu – lampu di pusat kota, demikian juga sebaliknya, jika kita berada di Kota Bawah kita dapat menyaksikan indahnya panorama Kota Atas dengan tebaran rumah di kaki gunung, dan gemerlap lampu yang menerangi kaki gunung di malam hari.

Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah II Stasiun Klimatologi Semarang, Kota Semarang seperti kota lainnya di Jawa Tengah memiliki suhu udara berkisar rata-rata $27,5^{\circ}\text{C}$ dengan temperatur rendah berkisar antara $24,2^{\circ}\text{C}$ dan tertinggi berkisar $31,8^{\circ}\text{C}$, dengan kelembaban udara rata-rata 79% dan beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun.

Sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administratif yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, dengan garis pantai 13,5 Km, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal.

Selain itu, Kota Semarang sebagai ibukota provinsi memiliki letak yang sangat strategis karena diapit oleh beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bandung di sebelah Barat, Surabaya dan Malang di sebelah Timur, serta Jogjakarta dan Solo di sebelah Selatan.

Kota Semarang mempunyai luas wilayah 373,70 Km² yang secara administratif terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mijen (57,55 Km²) diikuti oleh Kecamatan Gunungpati (52,63 Km²) dan Kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Tengah (5,14 Km²).

Semarang berasal dari bahasa Jawa yaitu asem arang yang artinya pohon asam yang tumbuh jarang-jarang, daerah pemukiman pedesaan yang kemudian berkembang menjadi Kota Semarang saat ini pertama kali dirintis oleh seorang Kesultanan Demak, yaitu Pangeran Made Pandan bersama putranya yaitu Sultan Pandanaran II, yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang, yang adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota, dan dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiulawal 954 H atau 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kota Semarang.

Kota Semarang dalam pembangunannya memiliki visi yaitu Semarang Kota Metropolitan yang Religius Berbasis Perdagangan dan Jasa, yang mengandung makna bahwa selama lima tahun kedepan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki tiga kunci pokok yakni, Kota Metropolitan yang mengandung arti bahwa

Kota Semarang mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota, Religius mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang menyakini akan kebenaran ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya. Sedangkan Perdagangan dan Jasa merupakan basis aktivitas ekonomi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam jangka waktu lima tahun kedepan dapat terwujud Kota Semarang yang memiliki sarana prasarana kota berskala metropolitan, dengan ekonomi utama yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, serta tetap memperhatikan keberadaan potensi ekonomi lokal, dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius serta guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Kota Semarang 2005-2010 tersebut, maka dijabarkan dalam 6 misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Semarang, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memperbesar akses bagi masyarakat miskin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan public, kemandirian

keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur pemerintahan yang berbasis teknologi;

3. Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif, melalui upaya penegakan hukum dan peraturan, pengembangan budaya tertib dan disiplin serta menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan berinvestasi, penguatan dan perluasan jaringan kerjasama ekonomi lokal, regional, dan internasional;
5. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran pemuda;
6. Mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2. Pengaturan hak cipta karya arsitektur menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2002

Keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia merupakan potensi nasional yang harus dilindungi, karena kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual, oleh karena itu keberadaannya harus dilindungi oleh undang-undang.

Untuk karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan di Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Semula ketentuan mengenai hak cipta diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 yang mengakhiri berlakunya *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600 yang kemudian direvisi dengan UU No. 7 Tahun 1987, setelah itu dirubah dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan terakhir diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002 yang berlaku hingga saat ini.

Hak Cipta merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual dan merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya atas ciptaan atau imajinasi manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Istilah ini adalah terjemahan dari istilah Inggris yang disebut *copyright* yang dalam bahasa Belanda disebut *auteursrecht*.

Meskipun Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas

penggunaan *invenisi* (hasil penemuan), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus, melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan *Walt Disney* tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Perlindungan hak cipta adalah perlindungan atas karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, dan perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena hak cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar.

“Esensi yang terpenting dari hak cipta sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu ciptaan tertentu atau disebut

Creation menjadi sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis”.²⁹

Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur yang terdapat didalam hak cipta tersebut adalah :

1. Hak eksklusif
2. Pencipta atau penerima hak
3. Mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin
4. Adanya pembatasan menurut undang-undang

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-undang Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

“Pencipta atau penerima hak cipta memiliki hak eksklusif yaitu hak istimewa atas karya ciptaan dalam kemampuannya melahirkan hak yang baru”.³⁰

²⁹ M. Djumhana, R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan Prakteknya)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 21

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
2. mengimpor dan mengekspor ciptaan,
3. menciptakan karya turunan atau *derivatif* atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
5. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan mengumumkan atau memperbanyak adalah termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak-hak yang melekat pada pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak dan memberi izin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, dan hak ekonomi dapat

³⁰ Ibid, hal. 55

dialihkan kepada orang atau badan hukum, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pengalihan tersebut dapat terjadi karena :

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian Tertulis; atau
5. Sebab-sebab lain oleh peraturan perundang-undangan

Sedangkan hak moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan, karena ciptaan tetap melekat pada penciptanya, sehingga disini terdapat hubungan yang erat antara pencipta dan ciptaannya yang pada dasarnya tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral ini meliputi perubahan atas karya cipta yang akan merugikan nama baik dan reputasi kerja dari pencipta.

Prof. Mahadi dalam buku karangan Saidin mengemukakan bahwa setiap subjek tentu ada objek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan

yang lain. Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik.³¹

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, juga diatur beberapa hal yang dianggap tidak melanggar hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas, dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

³¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.70

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional, ataupun melarang penyebaran ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum.

Menurut UU No.19 Tahun 2002 Pasal 13, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun keputusan badan *arbitrase* atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa). Di Amerika Serikat, semua dokumen pemerintah, berada dalam domain umum, yaitu tidak berhak cipta.

Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakkan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pencipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Sedangkan yang dimaksud sebagai ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Mengenai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

1. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay-out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama atau drama musika, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. arsitektur;
8. peta;
9. seni batik;
10. fotografi;
11. sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pemegang hak cipta atas karya ciptaan-ciptaan tersebut adalah pencipta itu sendiri, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari penerima hak.

Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum, maka ciptaan-ciptaan tersebut harus didaftar, tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas karya cipta tersebut.

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran

ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan.

Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Ham. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Hak Cipta juga dinyatakan bahwa pendaftaran tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi, oleh karena itu suatu ciptaan didaftar maupun tidak tetap diakui dan mendapatkan perlindungan hukum. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

“Dari penjelasan umum dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran tersebut bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa”.³²

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah karya arsitektur, yang dimaksud dengan karya arsitektur menurut penjelasan Undang-undang Hak Cipta antara lain meliputi : seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

³² Saidin, Op.Cit., hal 90

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta karya arsitektur yang merupakan karya peninggalan prasejarah, atau sejarah, hak ciptanya dipegang oleh negara, demikian juga dengan folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Selanjutnya dalam Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu.

Negara sebagai pemegang hak cipta disini berarti bahwa negara dalam hal ini negara berfungsi sebagai pelindung baik terhadap pencipta maupun terhadap ciptaan atau suatu karya cipta.

Negara diposisikan sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda nasional lainnya termasuk folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama karena alasan perlindungan, yaitu untuk melindungi objek hak cipta dari ancaman kepunahan, terutama, pengalihannya dengan melawan hukum terhadap pihak asing³³ selain itu nilai historislah yang menjadi tolak ukur utama dalam penentuan kaedah ini, meskipun secara ekonomis tidak dapat dihindarkan wujud nyata dari karya itu dalam bentuk barang (benda) berwujud mempunyai harga jual yang tinggi”.³⁴

Dalam Pasal 15 huruf f Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perubahan yang terjadi atau dilakukan atas suatu karya arsitektur hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

³³ Saidin, Op.Cit, hal. 78

³⁴ Ibid, hal. 78

Dapat dikemukakan sebagai contoh dalam hal ini adalah ada kemungkinan suatu bangunan sketsa-sketsanya, pemagaran balkon tingkat atasnya terlalu rendah, sehingga perlu dipertinggi yang menyimpang dari gambar sketsanya, karena itu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perubahan atas pertimbangan teknis”³⁵ jadi berdasarkan pertimbangan teknis pemagaran yang terlalu rendah untuk balkon tingkat atas tidak laik fungsi karena berbahaya bagi keselamatan, sehingga diperbolehkan untuk dirubah.

Oleh karena itu perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur yang bukan berdasarkan pada suatu pertimbangan teknis merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Pelanggaran hak cipta terjadi apabila perubahan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak tanpa ijin. Dalam Pasal 1 ayat (5) dan (6) yang dimaksud dengan pengumuman dan perbanyakan adalah pengumuman meliputi pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Sedangkan perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang substansial dengan

³⁵ Ibid, hal. 85

menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengaliwujudan secara permanen atau temporer.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Pelanggaran terhadap hak cipta sebagaimana diatas diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 71 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pelanggaran atas hak cipta sifatnya adalah delik biasa, yaitu tanpa pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait dapat dilakukan penuntutan.

Dengan argumentasi bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta, penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa dinilai cukup tepat".³⁶

Dengan demikian suatu pelanggaran terhadap karya cipta dapat langsung diperkarakan tanpa harus ada pengaduan terlebih dahulu, karena hak cipta merupakan mutlak merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta sehingga merupakan suatu kewajaran apabila terjadi pelanggaran atas hak tersebut meskipun tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun perdata.

³⁶ Ibid, hal. 112

Dalam bidang arsitektur, pengambilan ide bangunan dapat saja dikatakan bukan sebagai pelanggaran, sepanjang konteksnya masih berkisar pada preseden (meniru konsep/aspek-aspek perancangan suatu bangunan) dan memesis (meniru bentuk suatu bangunan), maka desain tersebut masih dapat dikatakan sebagai desain orisinal bukan desain plagium.

“Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya”.³⁷ Oleh karena itu sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya “ dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan kewajiban untuk menghormati hak tersebut”.³⁸

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya maka perlindungan hukum terhadap pencipta maupun ciptaannya merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, karena dengan adanya perlindungan hukum berarti hak-hak kepentingan pencipta diakui dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

Upaya hukum untuk menuntut pelanggaran hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan melalui tuntutan pidana atau gugatan perdata kepada Pengadilan Niaga.

³⁷ M. Djumhana, R Djubaedillah, Op. Cit., hal. 55

³⁸ Ibid, hal. 55

Sengketa-sengketa perdata seperti ganti rugi diajukan kepada Pengadilan Niaga, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Jangka waktu penyelesaian sengketa dibatasi dalam 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Dalam hal ketentuan pidana atas pelanggaran Hak Cipta, penetapan sanksi dan denda yang tinggi semata-mata bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dan memberikan kesempatan untuk tumbuhnya industri lokal atau nasional.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hak Cipta Arsitektur Perumahan

Istilah arsitektur sering dipakai, namun jarang ada orang yang memakai secara sama. Di kamus istilah tersebut disamakan dengan seni bangunan³⁹. Walaupun dikatakan demikian, istilah arsitektur bermakna lebih luas. Kata arsitektur berasal dari dua kata Yunani kuno, yaitu *αρχη* (*arché*) yang berarti asal/alas/dasar/pertama serta *τεχνη* (*techné*) yang berarti seni/pertukangan⁴⁰. Dari etimologi tampak bahwa arsitektur secara

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta. Balai Pustaka. 2002

⁴⁰ <http://de.wikipedia.org/wiki/architektur>

harfiah sebagai seni pertukangan yang pertama dan dasar. Dalam makna tersebut tersembunyi istilah pengetahuan berkaitan dengan ilmu yang memegang dan membahas pengetahuan tersebut. Pada hakikatnya arsitektur adalah sintesis tiga lingkungan dasar, yaitu : seni (estetika), pertukangan (ketrampilan), teknik (pengetahuan). Oleh sebab itu, bidang arsitektur bersifat interdisipliner yang melibatkan banyak bidang lain, termasuk ilmu eksakta maupun noneksakta⁴¹.

Sudah dibahas sejak lama, ⁴² kapan sebuah objek dapat dianggap sebagai karya arsitektur. Kriteria dan lingkup apa yang berlaku untuk menjawab pertanyaan tersebut? Dalam sejarah arsitektur tampak bahwa perhatian begitu lama diberikan hanya pada estetika karya tokoh yang selalu berkaitan dengan bangunan elite. Sikap tersebut sangat mempengaruhi pandangan orang dan arsitek sampai saat ini.⁴³ Saat ini pandangan tersebut sering dikritik dengan menuntut keterlibatan lingkup pembangunan secara luas dan umum, baik formal maupun informal.⁴⁴ Skala arsitektur juga sering tidak jelas, karena arsitektur meliputi skala makro (kota)⁴⁵ sampai mikro (perabotan rumah).

Berdasarkan makna arsitektur tersebut, maka arsitek adalah tukang pertama dalam bidangnya. Profesi arsitek memang sudah lama diberi

⁴¹ Istilah arsitektur juga sering dipakai dalam bidang yang tidak berkaitan secara langsung dengan bidang arsitektur, misalnya bidang komputer.

⁴² Bdk. misalnya secara falsafah : Foucault, Michel. *The Order of Things*. 1966; *The Archology of Knowledge*. 1969.

⁴³ Zahnd, Markus. *Perancangan kota model baru berdasarkan pengetahuan kontekstual*. 2007. Hlm. 2

⁴⁴ Egenter, Nold. *Twenty problems-UIA Barcelona –Manifesto of an architectural anthropologist*. 1997. section 15; Rapoport, Amos. *History and precedent in environmental design*. 1990. hlm. 12

⁴⁵ Zahnd, Markus. *Perancangan kota yang terpadu*. 1999

nama lain, misalnya tukang kepala kayu atau ahli bangunan pada Abad Pertengahan di Eropa. Dalam lingkungan Jawa-Hindu, profesi tersebut lama dipegang oleh para pedanda, karena arsitektur dianggap holistik (termasuk profane dan sakral).⁴⁶

Adapun tugas dan kemampuan yang dituntut dari seorang arsitek oleh O.M. Ungers ditetapkan sebagai berikut :

Seorang arsitek memiliki kemampuan secara luas dan mendalam untuk menggabungkan bagian-bagian tunggal ke dalam kesatuan yang disusun pada tingkat hierarki yang lebih tinggi, sehingga bagian-bagian tersebut bermakna lebih besar pula daripada sebelumnya.⁴⁷

Kemampuan tersebut dapat diungkapkan dalam lingkungan formal dan informal, misalnya dalam budaya Indonesia, pengetahuan cara membangun rumah tradisional lama sekali diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga makna arsitekturalnya menjadi umum. Sangat disayangkan pengetahuan tersebut secara umum sudah banyak yang hilang, karena dianggap kuno dan tidak memiliki relevansi dalam arsitektur modern saat ini. Hal ini terjadi karena banyak aspek arsitektur tradisional hanya diperhatikan secara lahiriah tanpa prinsip dan aturan digunakan dalam arsitektur modern. Tampak dan bentuk arsitektur dapat berbeda, karena bersifat subjektif, tetapi prinsip dan aturan yang berada dalam arsitektur tetap sama, karena bersifat objektif.

⁴⁶ Jan, Pieper. *Die Anglo-Indische Station*. 1977

⁴⁷ Ungers, Oswald Mathias. *Architekturlehre*. Berliner Vorlesungen 1964-65. Archplus No. 179. 2006

Pada zaman dulu di Indonesia, prinsip dan aturan arsitektur tertentu menjadi standar secara umum dalam pembangunan lingkungan, baik untuk bangunan publik maupun privat. Standar tersebut (pengetahuan arsitektur yang disepakati bersama) tidak berlaku lagi dalam arsitektur modern di Indonesia. Akibatnya pembangunan dalam bidang arsitektur sering didasarkan pada kriteria subjektif yang hanya dipegang oleh satu individu atau kelompok saja. Sehingga sering kali terjadi pertentangan arsitektur dalam satu kawasan, karena pembangunan karya arsitektur tidak lagi diterapkan berdasarkan kriteria objektif. Hal itu terjadi karena dalam zaman global ini sering dibicarakan semua bahasa arsitektur secara sekaligus dalam satu tempat, sehingga terlalu banyak pihak dan citra arsitektur menutupi pengetahuan kriteria dan aspek dasar yang berlangsung dalam satu kawasan. Dengan demikian, kriteria penilaian arsitektur dalam realitas pembangunan arsitektur sering tersembunyi (*black-box*), dan penilaian arsitektur hanya dapat didasarkan pada kriteria suka-tidak-suka yang subjektif. Situasi tersebut menurunkan kualitas arsitektur di Indonesia, karena ketentuan standar arsitektur dalam satu lingkungan tidak dapat disetujui lagi secara objektif, dan tidak ada dasar kriterianya. Kesulitan penilaian arsitektur tersebut disebabkan karena ambiguitas dalam anggapan tentang arsitektur yang berlangsung di Indonesia.

Ambiguitas dalam arsitektur di Indonesia berasal dari perkembangan sejarahnya. Sejak awal zaman hunian di Asia, termasuk

Indonesia, semua kriteria arsitektur bersifat dan berkembang secara arkais-ritual. Kemudian pada zaman koloni, orang Belanda memperkenalkan arsitektur berdasarkan kriteria klasik-estetis Eropa yang berasal dari budaya Yunani kuno.⁴⁸ Kemudian sejak awal abad ke-20 kriteria tersebut menjadi paling dominan di seluruh dunia, sehingga menjadi standar juga dalam pendidikan arsitektur di Indonesia dengan dukungan dari system pendidikan Belanda. Meskipun demikian, kebanyakan tekanan kriteria arsitektur dalam system tersebut kurang didukung oleh falsafah budaya Indonesia. Akibatnya banyak orang Indonesia (termasuk ahli arsitektur) terpecah di antara kedua dasaran tersebut, sehingga para kritikus arsitektur pada saat ini juga sering hanya membicarakan aspek sekunder, karena aspek primer yang ada sulit digabungkan antara kedua dasar tersebut yang sekarang berada dalam lingkungan Indonesia. Oleh sebab itu penting untuk memahami pengetahuan dasar tentang kriteria dan prinsip primer yang berlangsung dalam bidang arsitektur.

Seharusnya UU Hak Cipta memberikan kesadaran akan pentingnya hukum Hak Cipta dengan memberikan aturan yang lebih sesuai dengan cakupan permasalahannya, bukan dengan sekedar mengeneralisasinya.

⁴⁸ Pieper, Jan. op. cit. Perbedaan tersebut juga dibahas secara mendalam : Mangunwijaya, Y.B. Wastu Citra. 1992.

UU hak cipta arsitektur patut diberikan perhatian lebih lanjut mengingat, sama seperti beberapa bidang lainnya, perbedaan antara kegiatan meniru dalam menunjang proses kreatif arsitek sangatlah tipis dengan apa yang dinamakan pelanggaran hak cipta karya arsitektur.

Kapasitas pemerintah yang terbatas dalam merumuskan dan menerapkan aturan-aturan mengenai hak cipta-khususnya dalam lingkup arsitektur, seharusnya dapat menjadi latar belakang kuat bagi pihak-pihak diluar pemerintah, untuk bekerjasama dengan semua elemen masyarakat dan organisasi arsitektur yang terkait, bersama pemerintah, mengupayakan sebuah rumusan hukum hak cipta arsitektur yang lebih mendalam dan terarah pada perkembangannya. Kemudian, upaya tersebut dilanjutkan dengan upaya mensosialisasikannya dengan baik, sehingga tercipta interpretasi yang seragam-mengenai hukum hak cipta di lingkup arsitektur, baik untuk pemerintah, masyarakat umum dan tentunya pihak-pihak yang terlibat di dunia arsitektur.

Selain dari permasalahan substansial di atas, UU Hak Cipta khususnya di lingkup arsitektur membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan untuk mengatur, tetapi juga untuk dukungan dalam bertindak. Sistem UU yang masih berorientasi dalam berbicara dan bertindak melalui panduan dan sanksi-sanksi sebagai hasil akhirnya, seharusnya juga menggambarkan bagaimana kita mempunyai tolak ukur dapat berupa proteksi atauantisipasi yang jelas untuk menghindari pelanggaran hak cipta.

Sedikit melihat keluar dari Indonesia, dapat diketahui bahwa UU Hak Cipta Eropa dan Amerika dengan jelas menjaga dan mengantisipasi pelanggaran yang (akan) terjadi hanya dengan kita melihat falsafah dasar yang dianutnya dalam merumuskan dan mengembangkan UU hak ciptanya.

Berbeda dengan masyarakat hukum Eropa yang lebih menganut *Moral Right* sebagai landasan undang-undang hak ciptanya *Moral Right* mengarahkan hukum hak cipta negara-negara di Eropa untuk memberikan suatu

pengakuan yang luhur bagi pencipta dan karya ciptaannya. Lebih lanjut diartikan bahwa hak cipta merupakan author right dan invention right. Pencipta dan karyanya memiliki dan dilindungi oleh hak moral (*moral right*), hak yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun, walaupun telah terjadi sebuah pengalihan hak cipta. Hak moral juga menyatakan bahwa suatu karya cipta merupakan refleksi pribadi dari pencipta, karena itu ia mutlak tidak dapat dibagi-bagi maupun dilakukan perubahan. Aplikasi dari hak moral dikenal dengan istilah patent-hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas penemuannya di bidang teknologi untuk waktu tertentu.

Amerika yang lebih mengutamakan falsafah *Economic Right* dalam menjalankan undang-undang hak ciptanya, dimana *Economic Right* lebih mengarah kepada sisi perlindungan ekonomi bagi para pencipta. *Economic Right* juga memperkenalkan istilah *copyright* yang dapat diartikan secara sederhana sebagai *the right to copy* atau hak untuk memperbanyak atau menggandakan dengan mensyaratkan adanya kompensasi materi bagi para

penciptanya (royalti). Hak ini dinyatakan sebagai langkah kompromi yang dibuat pemerintah untuk para pencipta dan masyarakat yang menggunakan (menggandakan) karyanya dalam upaya mendorong ide dan kreativitas sekaligus pula memberikan kesempatan yang wajar untuk dapat digunakannya hasil-hasil karya cipta.

Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah aman dan cepat dengan menempatkan kedua pengaruh dan pandangan di atas sebagai landasan undang-undang Hak Cipta-nya. Secara peristilahan dipergunakan terminologi hak cipta atau *invention right* sehingga dapat dikategorikan sebagai *moral right*. Namun secara substansi, UU Hak Cipta juga diwarnai dengan hal perlindungan *economic right*. Dalam Pasal 1 butir ke-1 UU Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, dalam Bagian Ketujuh UU Hak Cipta yaitu pada Pasal 24 dan 25 diatur

tersendiri mengenai perlindungan hak moral terhadap karya cipta.

Tidak jelas alasan mengapa pemerintah Indonesia dengan tegas mengambil kedua landasan tersebut dalam merumuskan undang–undang tentang Hak Cipta. Bisa jadi pemerintah Indonesia memang merasa karya asli warga negaranya perlu mendapatkan perlindungan moral juga sekaligus perlindungan secara ekonomi, atau hanya berusaha bersikap netral di tengah–tengah kancah hukum hak cipta internasional.

Menjadi persoalan untuk arsitektur karena dalam proses meniru seorang arsitek, sangatlah sulit untuk menempatkan paten dalam melindungi karya arsitektur yang ditirunya. Contoh aplikasi dari langkah paten seperti pencatuman nama sumber (pasal 24 butir 1) maupun tidak diperbolehkan adanya pengubahan bentuk asli (pasal 24 butir 2), tidaklah mudah untuk diterapkan dalam setiap proses kreatif arsitektur yang menuntut banyaknya referensi dan variasi baik penambahan maupun pengurangan bentuk.

Lain halnya dengan paham *Economic Right* yang mengedepankan *copyright* sebagai aplikasinya. *Copyright* dapat diterapkan dalam proses meniru seorang arsitek tanpa harus melupakan asal usul gagasan dan ide awal. Selain itu, *copyright* juga mampu menjaga wilayah etik seorang arsitek dalam meniru untuk menghasilkan suatu gagasan karena arsitek tersebut dibimbing untuk tidak hanya meniru tetapi juga didorong untuk melakukan perubahan walaupun kecil. Hal tersebut harus dilakukan mengingat adanya sanksi bila dapat dibuktikan adanya kemiripan karya yang signifikan.

Langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk menggabungkan *Moral Right* dan *Economic Right* ke dalam undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, tampaknya perlu dikaji ulang untuk bidang arsitektur. Untuk bidang arsitektur, pemerintah Indonesia lebih baik memprioritaskan atau mendominasi hanya satu pandangan Hak Cipta sebagai landasan undang-undangnya, dengan berbagai pertimbangan khususnya

mengenai hal-hal yang umum terjadi pada dunia praktik arsitektur.

Dalam pandangan penulis, masalah hukum dan hak cipta di dalam lingkup arsitektur di Indonesia belum mengalami perkembangan. penulis menduga hal serupa mungkin terjadi juga di beberapa lingkup keahlian lain, misalnya seni rupa atau seni tari, sementara dinamika yang terjadi pada kehidupan sehari-hari justru berkembang luar biasa. Pertanyaan dasar yang kerap datang adalah “bila sebuah rancangan arsitektur dapat dinyatakan sebagai jiplakan?”. Dan apakah bisa didekati seperti sebuah komposisi lagu yang dibatasi tidak boleh lebih dari 8 nada yang persis sama sebelum dinyatakan sebagai sebuah lagu jiplakan?. Gambaran bahwa sebenarnya memang ada semangat untuk membenarkan perkara ini, tapi tidak tahu harus mulai dari mana.

Sejauh yang diketahui dalam dunia praktik arsitektur, yang terjadi adalah kecenderungan untuk menggunakan pola copyright, yang menghalalkan sesuatu yang sudah ada sebagai sumber gagasan. Masalahnya kemudian,

seberapa jauh sesuatu itu masih dapat dianggap sebagai sumber gagasan dan belum sampai kepada penjiplakan. Sebuah karya arsitektur baru, katakanlah sebuah wujud fisik yang sama sekali baru tetapi mempunyai dasar sistem struktur dan sistem *engineering (mekanikal-elektrikal)* yang persis sama seperti bangunan lain yang sudah ada, apakah disebut duplikasi?. Sebuah karya rumah tinggal yang kemudian oleh arsiteknya sendiri sedikit disesuaikan untuk owner yang berbeda, apakah bisa disebut *self plagiarism*?

Penulis sependapat bahwa kelompok masyarakat, terutama asosiasi profesi, dapat melakukan inisiasi untuk menggulirkan dan mengembangkan hal penting ini. Tentu bukan hal yang sederhana, karena kerap kali masyarakat hanya melihat produk akhirnya saja, dan menyerahkan pembahasan substansial kepada pihak lain. Padahal, kesadaran tentang hak cipta sedikit banyak akan dipengaruhi oleh berbagai nilai dan sistem sosial masyarakat itu sendiri. Harus ada kesepakatan sosial bahwa dengan memiliki suatu hak tertentu, ada kewajiban besar pula yang harus dijunjung.

Karya arsitektur adalah ciptaan yang tidak kalah pentingnya dalam jajaran perlindungan hak cipta. Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap arsitektur dapat dikaitkan dengan aspek pengembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi, dimana arsitektur juga dapat dijadikan alat kontrol terhadap kejahatan.⁴⁹

Dilihat dari sudut kontrol terhadap kejahatan, arsitektur melalui suatu perancangan lingkungan yang berwawasan keamanan dapat mendorong terjadinya kontrol sosial alami, sehingga pada akhirnya perancangan arsitektur disesuaikan dengan tabiat, kebiasaan, kultur, serta perilaku suatu masyarakat.⁵⁰

Dilihat dari sudut pengembangan kebudayaan, arsitektur mencerminkan dan membawa nilai-nilai budaya bangsa yang sifatnya dan/atau mempunyai ciri khas. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka mempertahankan kepribadian dan nilai-nilai budaya Indonesia. Arsitektur sebagai salah satu hasil karya budaya, dapat dijadikan petunjuk bagi pengembangan budaya suatu bangsa, karena perkembangan kebudayaan dapat ditelusuri melalui perkembangan arsitektur.

Dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa terhadap karya arsitektur tidak boleh dilakukan perubahan / pengalihwujudan baik secara permanen maupun temporer terhadap keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dari karya

⁴⁹ Eko Budirahardjo, dalam Satjipto Rahardjo, et.all, *Arsitek dan Arsitektur Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, Hal. 116.

⁵⁰ Ibid. Hal. 98

arsitektur tersebut, baik dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, karena hal itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta.

Pertimbangan pelaksanaan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung, terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan.⁵¹

Persyaratan teknis bangunan adalah persyaratan yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Mengenai persyaratan teknis bangunan tersebut telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.⁵²

Persyaratan tata bangunan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.

Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan, dan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 28 tentang Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan

⁵¹ Abu Sudjak Isa, Hasil Wawancara, Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah.

⁵² Ir. Bambang Setioko, M.Eng., Hasil Wawancara, arsitek dan Ketua Program Pasca Sarjana Magister Teknik, dan anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang.

penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Selanjutnya penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Sedangkan persyaratan keandalan bangunan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Persyaratan keselamatan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. Persyaratan kesehatan bangunan dalam Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung. Persyaratan kenyamanan dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan, dan persyaratan kemudahan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana, dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Seorang arsitek tidak hanya dilarang meniru atau menggunakan gambar yang dibuat berdasarkan karya arsitek lain sehingga menimbulkan inspirasi baginya untuk merencanakan, dan/atau membuat bangunan yang sama atau hampir sama. Pengertian sama atau hampir sama mempunyai pengertian bahwa arsitek yang mengamati dan yang pada akhirnya merencanakan dan/atau membuat, dalam hal ini telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu dengan mengambil seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.⁵³

Suatu karya arsitektur dikatakan asli adalah bahwa karya arsitektur itu adalah benar-benar berasal dari arsitek yang bersangkutan, bukan hasil peniruan dari karya pihak lain, dalam pengertian bukan merupakan hasil jiplakan atau plagiat dari karya pihak lain yang tidak melandasi terciptanya karya tersebut sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan binaan dan tidak sesuai dengan budaya masyarakatnya.⁵⁴

Di bidang hak cipta perlindungan hukum mengenai karya arsitektur, diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebelumnya telah diuraikan bahwa sebelum berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak cipta karya arsitektur harus berpedoman pada stb. 1912

⁵³ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.90

⁵⁴ Ibid., hal.71

Nomor 600 yang dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda dan tetap berlaku pula untuk Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Auteurswet tersebut telah disesuaikan dengan Konvensi *Berne* dan mulai berlaku pada tanggal 23 September 1912, yaitu suatu konvensi di bidang hak cipta yang paling tua di dunia, yang diadakan pada tanggal 9 September 1866 di *Berne*, untuk perlindungan terhadap ciptaan-ciaptan di bidang sastra dan seni, suatu pengaturan perlindungan dengan hukum hak cipta yang telah dianggap modern pada saat itu. Dalam Konvensi *Berne* Pasal 2 dinyatakan yang merupakan obyek perlindungannya adalah karya-karya sastra dan seni, yang meliputi segala hasil di bidang sastra ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk dan pengutaraan apapun. Pada tanggal 26 Pebruari 1982, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat paripurna terbuka yang dihadiri oleh wakil pemerintah, yang dengan suara bulat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang Hak Cipta yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden Republik Indonesia No. 02/PU/1982 Tanggal 12 Januari 1982, untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Ada 2 (dua) pertimbangan hukum yang dikenakan sebagai dasar untuk mengganti *Auteurswet* 1912 seperti yang dimuat dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yaitu :

1. Dalam rangka pengembangan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1981), serta untuk mendorong dan melindungi pencipta, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengaturan tentang Hak Cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 stb. Nomor 600 / Tahun 1912 perlu dicabut karena tidak sesuai dengan kebutuhan cita-cita hukum nasional.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tidak dapat bertahan lama, hanya kurang lebih 5 (lima) tahun. Ada beberapa pasal yang perlu dirubah dengan pertimbangan dimana selama pelaksanaannya banyak ditemukan kelemahan-kelemahan yang dapat dilihat dalam pemberlakuannya, yaitu :

1. Pemberian perlindungan hukum pada hak cipta dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan ilmu yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

2. Ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat,khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk pembajakan.
3. Pelanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta khususnya.
4. Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta, dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Perubahan terhadap Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan-ciptaan, juga diharapkan dapat menghambat atau mencegah kegiatan pelanggaran hak cipta yang pada akhirnya dapat mengatasi atau menghentikan atau setidaknya dapat mengurangi tindak pelanggaran di bidang hak cipta.

Bidang dan arah penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 mencakup :

1. Kepidanaan
2. Jangka waktu perlindungan
3. Karya cipta yang dilindungi
4. Lingkup berlakunya Undang-undang Hak Cipta

5. Hubungan antara Negara dan pemegang hak cipta

Pada tanggal 21 Maret 1987 oleh Dewan Perwakilan Rakyat disahkan perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Selanjutnya UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta dirubah kembali dan diganti dengan UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yang telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *TRIPs*, namun ternyata masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi untuk memberi perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya, selain itu perlu ditegaskan kedudukan hak cipta disatu pihak dan hak terkait dilain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara jelas, maka lahirlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga saat ini.

Karya arsitektur pada dasarnya sudah mendapat perlindungan atau sudah termasuk sebagai salah satu lingkup yang dilindungi dalam dan/atau sebagai kekayaan intelektual sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 sampai diterbitkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hanya saja Hak Cipta karya arsitektur khususnya perumahan sebagai suatu kekayaan intelektual kurang mendapat perhatian dari

pemerintah. Di dalam Undang-undang Hak Cipta pengaturan mengenai karya arsitektur perumahan tersebut masih kurang memadai.

Dalam ketentuan Undang-undang Hak Cipta merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengaliwujudan secara permanen atau temporer, dan dalam Pasal 15 huruf f UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa perubahan terhadap karya arsitektur hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis.

Pelanggaran terhadap hak cipta sebagaimana diatas dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Karya Arsitektur Perumahan dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Karya Arsitektur Perumahan.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan diadakannya Undang-undang Hak Cipta adalah untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual seseorang yang memiliki bentuk khas, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Agar tujuan hukum itu dapat tercapai maka disatu pihak hukum itu harus mampu menciptakan masyarakat yang patuh kepada hukum dan dilain pihak dapat menciptakan atau memberikan rasa aman dalam berkarya karena mampu melindungi karya seseorang.

Untuk menciptakan masyarakat yang patuh kepada hukum agar tujuan ideal hukum dapat tercapai, perlu diperhatikan efektifitas perundang-undangan dan kelengkapan aturan-aturan dari Undang-undang tersebut. Ukuran untuk mengetahui efektifitas perundang-undangan adalah dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perundang-undangan agar berlaku secara efektif.

Efektifitas perundang-undangan antara lain ditentukan oleh :

1. Materi perundang-undangan itu sendiri;
2. Kelembagaan dan aparat pelaksana;
3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Budaya masyarakat.

Masalah efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan usaha-usaha yang dilakukan agar hukum yang diterapkan benar-benar hidup di dalam masyarakat. Artinya bahwa hukum benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Berfungsinya hukum sedemikian ini sangat tergantung pada usaha-usaha menanamkan hukum tersebut, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut.

Efektifitas menyangkut juga penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :

1. Mudah atau tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum tersebut ditangkap atau dipahami;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum tersebut;
3. Efisien atau efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan :
 - aparat administrasi yang menyadari kewajiban untuk melibatkan diri dalam usaha yang demikian itu.
 - Masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam mobilisasi hukum
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah bagi setiap warga masyarakat, akan tetapi juga cukup efektif menyelesaikan sengketa-sengketa.

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan dan pranata-pranata hukum itu sesungguhnya berdaya kemampuan efektif.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak cipta karya arsitektur perumahan perlu ditunjang dengan keefektifitasan berlakunya dan pelaksanaan yang konsisten serta diperlukan juga andil atau campur tangan dari semua pihak yang terkait, karena jika tidak suatu peraturan perundang-undangan tidak akan efektif sehingga yang timbul kemudian adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta.

Pelanggaran terhadap hak cipta sifatnya adalah delik biasa, yaitu tanpa pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait dapat dilakukan penuntutan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau oleh Polisi. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang sebagai Penyidik Khusus sesuai dengan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Penetapan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai delik biasa merupakan suatu tindakan yang tepat, karena dengan demikian apabila terdapat indikasi telah terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak cipta, maka aparat yang berwenang diharapkan dapat segera melakukan tindakan *preventive* tanpa harus menunggu adanya laporan dari pihak

lain, sehingga pelanggaran terhadap hak cipta dapat sedini mungkin diatasi. Namun dalam hal ini diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait sehubungan dengan penegakan hukumnya.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang sebagai penyidik khusus mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam UU Hak Cipta, yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan pelanggaran Hak Cipta.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta.
3. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan pelanggaran di bidang Hak Cipta.
4. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
5. Melakukan penyitaan bersama-sama polisi terhadap bahan dan barang hasil dari pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam pelanggaran Hak Cipta.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran Hak Cipta.

Meskipun dapat dilihat dengan jelas adanya indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur, namun hingga

saat ini belum terlihat adanya tindakan nyata yang diambil sehubungan dengan terjadinya pelanggaran tersebut.

Menurut Ir. Agung Dwiyanto, MSA., meskipun diketahui telah banyak terjadi pelanggaran terhadap karya arsitektur di bidang perumahan, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah perkara pidana. Hal ini disebabkan karena tidak diketahuinya barometer untuk menandakan apakah sebuah perubahan, inovasi ataupun pengubahan bentuk desain sebagai suatu pelanggaran. Persamaan desain yang dipergunakan oleh developer-developer perumahan selama ini dirasa wajar, karena adanya trend mode desain perumahan dan juga segmen perumahan.⁵⁵

Segmen perumahan dapat dibentuk berdasarkan kelompok pendapatan penduduk, lokasi, penyedia rumah (formal dan informal). Dari unsur-unsur pembentuk segmen perumahan ini dapat dibentuk matriks, misalnya lima baris penghasilan penduduk (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi) dan empat lajur (formal pusat kota, informal pusat kota, informal pinggir kota dan formal pinggir kota).

Selain itu, menurut Budhiarso.W.SH.,MH., meskipun diketahui telah banyak terjadi pelanggaran terhadap karya arsitektur dengan dilakukannya perubahan atau pengaliwujudan terhadap suatu desain karya arsitektur tersebut di Kota Semarang, namun sampai saat ini belum ada satu kasus pun yang sampai ke Pengadilan. Menurut Beliau hal ini

⁵⁵ Ir. Agung Dwiyanto, MSA., Hasil Wawancara, arsitek dan Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

disebabkan antara lain, masih kurang efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada, disebabkan karena kurangnya koordinasi yang baik di antara para penegak hukum itu sendiri, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri.⁵⁶

Kurangnya pengetahuan masyarakat pada umumnya, bahwa suatu karya arsitektur khususnya perumahan merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang, dan mereka beranggapan bahwa jika suatu desain digemari, terlebih jika desain itu banyak mendatangkan pembeli dan menandakan harga yang ditawarkan, maka hal itu merupakan suatu kewajiban, bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Mereka tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

Lemahnya sanksi yang diberikan terhadap suatu pelanggaran juga dapat menyebabkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak efektif, karena masyarakat cenderung mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih memandang / beranggapan sanksi perdata berupa ganti rugi merupakan sanksi yang dianggap ringan

⁵⁶ Budhiarso.W,SH,MH., Hasil Wawancara, Departemen Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Jawa Tengah, Penyidik HKI.

dibanding dengan sanksi pidana berupa kurungan, karena pidana kurungan lebih memberikan efek psikologis terhadap seseorang.⁵⁷

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Meskipun pelanggaran terhadap hak cipta diancam dengan sanksi pidana dan sanksi perdata (ganti rugi), namun sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran hak cipta lebih ditekankan pada sanksi perdata (ganti rugi). Karena dalam hak cipta perlindungan terhadap suatu ciptaan lebih ditekankan pada nilai ekonomis dari ciptaan tersebut.⁵⁸

Materi Peraturan perundang-undangan khususnya UU Hak Cipta, jika dicemarti dengan lebih teliti juga dirasakan belum cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya arsitektur

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

perumahan, karena peraturan hukum itu belum menjangkau wilayah terapan.

Kurang memadainya pengaturan terhadap hak cipta khususnya karya arsitektur yang merupakan desain perumahan, membuat semakin besarnya peluang untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta tersebut.

Disisi lain, bagi seorang arsitek merasa tidaklah etis jika mereka mendaftarkan ciptaannya karena merasa desain tersebut sebelumnya mungkin telah dipakai oleh arsitek yang lain. Padahal jelas disebutkan dalam ketentuan hak cipta, bahwa pendaftaran hak cipta dapat dilakukan orang perorangan sepanjang ia menghasilkan suatu ciptaan. Sayangnya, hal ini tidak terakomodir di kalangan arsitek karena dirasa sebagai hal yang awam.

Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran ciptaan bagi arsitek, bisa jadi merupakan faktor utama mengapa penegakan pelanggaran hak cipta karya arsitektur perumahan sulit dilakukan. Di samping faktor-faktor lain, seperti :

1. Belum diketahuinya barometer pelanggaran hak cipta arsitektur perumahan;
2. Kurangnya informasi/pengetahuan tentang perlindungan hak cipta arsitektur pada umumnya, dan arsitektur perumahan pada khususnya;
3. Karena kurangnya pemahaman tentang pendaftaran ciptaan di kalangan arsitek.

Usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya arsitektur perumahan bukanlah merupakan suatu usaha yang mudah. Meskipun telah ditetapkan beberapa perangkat hukum yang berhubungan dengan perlindungan terhadap sebuah desain tersebut, namun dalam prakteknya hal itu sangat sulit untuk diterapkan, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, khususnya dalam hal ini hak cipta atas karya arsitektur perumahan.

Pelanggaran itu sendiri, timbul karena masih kurang efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada sehubungan dengan penegakan hukumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama antara aparat terkait, kurangnya kesadaran hukum arsitek, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu perlu adanya upaya – upaya yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Sehingga, apa yang diharapkan dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan yaitu untuk memberikan perlindungan hukum dapat terlaksana.

Kurangnya pengaturan terhadap hak cipta karya arsitektur khususnya perumahan, membuat peluang terjadinya pelanggaran tersebut semakin besar, oleh karena itu perlunya segera Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dilengkapi dengan Peraturan Pelaksananya,

antara lain di bidang Pengaturan Hak Cipta atas Karya Arsitektur termasuk karya arsitektur perumahan.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat perlindungan hak cipta karya arsitektur diatur secara khusus dalam suatu Undang-undang, sebagai pelengkap Undang-undang Hak Ciptanya, untuk menampung konvensi *Berne*, sehubungan dengan masuknya Amerika Serikat menjadi anggota. Undang-undang itu dikenal dengan nama *The Architectural Works Copyright Protection Act 1990*.

Kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparaturnya seperti PPNS, Kapolri, Jaksa Agung, dan lainnya perlu dibina dan ditingkatkan dengan lebih baik lagi, dengan mengadakan MOU misalnya dalam rangka penegakan hukumnya. Melakukan kerja sama dengan berbagai elemen kemasyarakatan lainnya di bidang Hak Cipta dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta perumahan, seperti arsitek, para pemerhati dan pelaku perumahan, *developer* perumahan LSM, dan pihak-pihak lainnya yang memberikan kontribusi sehubungan dengan pelestarian.⁵⁹

Peran serta arsitek dalam rangka perlindungan karya arsitektur perumahan juga sangat penting, karena arsitek berkewajiban berperan aktif dalam berdirinya sebuah bangunan, arsitek berkewajiban memberikan saran-sarannya melalui Ikatan Arsitek Indonesia Cabang apabila mengetahui adanya pelanggaran.⁶⁰

⁵⁹ Budhiarso.W,SH,MH.,Loc.Cit.

⁶⁰ Ir. Bambang Setioko,M.Eng., Op.Cit.

Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena sebagaimana diketahui sosialisasi suatu peraturan hukum adalah merupakan hal yang penting untuk dapat menimbulkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi dimaksud misalnya dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang ruang lingkup dan hal-hal lain yang menyangkut isi atau materi Undang-undang dimaksud.

Selanjutnya dengan memberikan sanksi yang lebih tegas, misalnya dengan membebankan sanksi pidana (kurungan/penjara) dan sanksi perdata (ganti rugi) sekaligus. Karena jika sanksi yang dibebankan terhadap pelanggaran hak cipta lebih ditekankan pada sanksi perdata (ganti rugi) masyarakat cenderung mengabaikan atau menganggap ringan sanksi tersebut, karena kurang memberikan efek psikologis terhadap seseorang.⁶¹

Mengenai kendala yang dihadapi oleh kalangan arsitek sehubungan dengan pencegahan tindakan *plagiasm*, dapat dipergunakan bukti desain awal (*blueprint*) yang dimiliki seorang arsitek atau konsultan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan plagiat oleh arsitek lain. Baik secara konsep, struktur maupun penekanan desain, keseluruhannya tertuang dalam *blueprint* yang pastinya hanya akan dimiliki oleh si pembuat. Apabila terjadi sengketa, maka *blueprint* ini dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

⁶¹ Budhiarso.W,SH,MH.,Loc.Cit.

Salah satu solusi yang dapat diharapkan. adalah dengan mendorong partisipasi dari kalangan arsitek dan ahli hukum. Berbicara mengenai partisipasi, berarti harus melibatkan semua pihak terkait dalam proses sedini mungkin dengan suatu kepastian bahwa semua pihak akan memperoleh keuntungan dalam proses ini. Meskipun hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang mudah.

Kurangnya pemahaman tentang pendaftaran ciptaan di kalangan arsitek patut disayangkan. Terlebih karena tidak ada mata kuliah yang khusus mempelajari tentang perlindungan ciptaan arsitektur di universitas. Seharusnya, mata kuliah ini juga diberikan agar ke depannya para arsitek muda dapat mengetahui bahwa seluruh ciptaan memiliki perlindungan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hak Cipta Arsitektur Perumahan

Perlindungan hak cipta perumahan di Indonesia masih kurang dimanfaatkan dan kurang mengakomodir kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yaitu arsitek selaku perancang dan developer selaku pembangun perumahan.

Tidak diketahuinya indikator penjiplakan menjadikan kalangan professional menganggap hal-hal seperti ini bukan hal yang dapat diurutkan penyelesaiannya. Hal ini disebabkan juga atas kurangnya pemahaman perlindungan hak cipta arsitektur oleh mereka. Selama ini kalangan arsitek menganggap karya mereka tidak perlu didaftarkan di kantor HKI karena merasa bahwa selain mereka pastinya sudah pernah ada arsitek lain yang menggunakan teknik, metode, desain, struktur maupun kontur yang demikian. Padahal, kembali mengingat tentang pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas bahwa sepanjang sebuah ciptaan selesai dibuat, maka secara otomatis hak cipta pun melekat pada si pencipta atau pemegang hak cipta, akan tetapi hal ini harus didaftarkan ke Kantor HKI atas pendaftaran ciptaan.

2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Karya Arsitektur Perumahan dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Karya Arsitektur Perumahan.

Terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur perumahan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :

- a. Kurang efektifnya peraturan perundang-undangan itu sendiri, yang disebabkan antara lain :
 - Kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara kelembagaan dan aparat pelaksana serta pihak-pihak terkait lainnya.
 - Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- b. Penerapan sanksi yang dianggap relatif masih ringan, karena hanya lebih menekankan pada sanksi perdata berupa ganti rugi.
- c. Materi Perundang-undangan yang dirasakan belum cukup memadai dalam pengaturannya terhadap karya arsitektur perumahan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur perumahan tersebut, antara lain adalah :

- a. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparaturnya terkait seperti PPNS, Kapolri, Jaksa Agung, dan lainnya. Selain itu juga melakukan kerja sama dengan berbagai elemen kemasyarakatan lainnya di bidang Hak Cipta dalam penanggulangan pelanggaran Hak Cipta Perumahan, seperti arsitek, para pemerhati dan pelaku perumahan dan pihak-pihak lainnya yang memberikan kontribusi sehubungan dengan pembangunan perumahan.
- b. Dengan memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas, misalnya dengan membebankan sanksi pidana (kurungan/penjara) dan sanksi perdata (ganti rugi) sekaligus. Agar lebih dapat memberikan efek psikologis terhadap seseorang.
- c. Dengan memberikan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang terkait di bidang perumahan, khususnya arsitek tentang pentingnya pendaftaran ciptaan di Kantor Direktorat Jendral HKI agar memiliki bukti pendaftaran ciptaan, yang berguna apabila terjadi sengketa di Pengadilan.
- d. Meningkatkan peran serta arsitek dalam rangka pengembangan karya arsitektur perumahan tersebut, karena sesuai dengan kode etik arsitek, seorang arsitek berkewajiban berperan aktif dalam

perkembangan bangunan dan atau perumahan, arsitek berkewajiban memberikan saran-sarannya melalui Ikatan Arsitek Indonesia Cabang apabila mengetahui adanya kegiatan *plagium* atau *plagiat* di kalangan perumahan.

B. Saran

1. Melengkapi Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dengan Peraturan Pelaksananya, khususnya di bidang Pengaturan Hak Cipta atas Karya Arsitektur termasuk karya arsitektur Perumahan.
2. Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang ruang lingkup dan hal-hal lain yang menyangkut isi atau materi Undang-undang dimaksud misalnya.
3. Melibatkan partisipasi professional di bidang perumahan sedini mungkin akan pentingnya perlindungan hak cipta perumahan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran tentang hak cipta arsitektur, khususnya perumahan kepada mahasiswa (*civitas academica*).

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Budihardjo, Eko, *Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*, Bandung : Alumni, 1987.

_____, *Menuju Arsitektur Indonesia*, Bandung : Alumni, 1987.

_____, dalam Satjipto Rahardjo, et.all., *Arsitek dan Arsitektur Indonesia*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 1997.

Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta. Balai Pustaka. 2002

Damian Eddy. *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*. Jakarta : Alumni, Tanpa Tahun.

Djumhana, Muhamad, dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan Prakteknya)*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997.

Egenter, Nold. *Twenty problems-UIA Barcelona –Manifesto of an architectural anthropologist*. 1997. section 15; Rapoport, Amos. *History and precedent in environtmental design*.1990.

Foucault, Michel. *The Order of Things*. 1966; *The Archology of Knowledge*. 1969.

Hendraningsih, *Peran, Kesan, dan Bentuk-bentuk Arsitektur*, Bandung : Djambatan, 1985.

Ikatan Arsitek Indonesia, *Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pemberi Tugas*.

Irsyadi, Nur, et.all., *Proses Perancangan Yang Sistematis*, Bandung : Djambatan, 1982.

- Ishar, H.K, *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Jan, Pieper. *Die Anglo-Indische Station*. 1977
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1975.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Narbuko, Cholid, dan H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002.
- Nawawi, Hadari, Tanpa Tahun, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Priyono, Ery Agus, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2004.(jilidan)
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1984.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cetakan ke empat belas, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Sugangga, Bahan Perkuliahan Hukum Waris Adat, MKN-UNDIP, Semarang, 2005. (jilidan)
- Ungers, Oswald Mathias. *Architekturlehre*. Berliner Vorlesungen 1964-65. Archplus No. 179. 2006.
- Venantia. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Hukum Dalam Bisnis*, Buku Ajar Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya. 2006..

Webster Dictionary, Arsitektur Faweett Crest Book, Green Wich, 1974.

World Intellectual Property Organization. Intellectual Property Reading Material, WIPO Publication No. 476 (E), Geneve, 1995.

Zahnd, Markus. *Perancangan kota model baru berdasarkan pengetahuan kontekstual*. 2007.

_____, *Perancangan kota yang terpadu*. 1999

II. Karya Ilmiah

Mundardjito, *Research Method For Historical Urban Heritage Area*, Makalah dipresentasikan pada *Three Days Partical Course On Planning And Design Method For Urban Heritage*, USAKI-T.U. Darmstadt, Jakarta, 10 – 12 April 2002.

Widayati, Naniek, *Strategi Pengembangan Warisan Budaya (Sebuah Pandangan dari Sisi Arsitektur)*, Makalah dipresentasikan pada kongres Kebudayaan Indonesia ke V di Bukittinggi tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2003, Universitas Tarumanegara, Jakarta 2003.

III. Peraturan-peraturan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002/85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Kode Etik Arsitek Indonesia

Surat Keputusan Majelis Arsitek Indonesia Nomor 10/MJS-IAI/SK/IX/1992 Tentang *Kaedah Tata Laku Keprofesian Ikatan Arsitek Indonesia*.

IV. Website

<http://media.isnet.org/iptek/100/watt>.

<http://de.wikipedia.org/wiki/architektur>